

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/369912980>

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Book · January 2023

CITATIONS
0

READS
2

2 authors, including:



Nanda Saputra

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

67 PUBLICATIONS 81 CITATIONS

SEE PROFILE

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Bentuk interaksi dan peran perempuan di sekitar hutan mampu berdampak pada pengembangan dan pemeliharaan hutan mangrove serta peningkatan ekonomi dan kesejahteraan keluarga tersebut melalui pemanfaatan hasil hutan mangrove. Oleh karena itu perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perempuan dalam melakukan peran dan interaksi terhadap hutan mangrove, bentuk dan tingkat interaksi perempuan terhadap hutan mangrove dalam kegiatan pemanfaatan dan pelestariannya, serta peran serta perempuan pada peningkatan ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan hutan mangrove.

Perempuan dapat menjadi pendidik lingkungan. Perempuan atau ibu merupakan media edukasi pertama bagi anak-anak. Melalui ibu, pendidikan dan penyadaran mengenai kepedulian terhadap lingkungan dapat ditanamkan pada anak-anak sejak dini. Dari penerapan pola pengelolaan sampah dan pemilihan produk yang ramah lingkungan yang dilakukan dalam sebuah keluarga, anak akan ikut terbiasa dalam menjaga lingkungan. Jika nantinya kebiasaan dan kesadaran lingkungan mengakar dalam diri anak-anak, maka pada masa depan akan tercipta generasi yang peduli lingkungan.



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: Penerbitzaini101@gmail.com
website: <https://penerbitzaini.com/>



Jl. Kompleks Pelajar Tjue
Desa Baroh-Pidie 24151, Aceh
email: dkpt101@gmail.com
website: <https://www.dkpt.com/>



Talitha Wenifrida Massenga

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Editor: Marsoedi



PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

TALITHA WENIFRIDA MASSENGA

Talitha Wenifrida Massenga

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Editor:
Marsoedi



PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Penulis:

Talitha Wenifrida Massenga

Editor:

Marsoedi

Desain Sampul dan Tata Letak

Atika Kumala Dewi

ISBN: 978-623-5722-85-6

Cetakan: Januari 2023

Ukuran: A5 (14 x 20 cm)

Halaman: vi + 161 Lembar

Penerbit:

Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Anggota IKAPI (026/DIA/2021)

Redaksi:

Jalan Kompleks Pelajar Tijue

Desa Baroh Kec. Pidie

Kab. Pidie Provinsi Aceh

No. Hp: 085277711539

Email: penerbitzaini101@gmail.com

Website: <http://penerbitzaini.com>

Hak Cipta 2022 @ Yayasan Penerbit Muhammad Zaini

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan buku Peran perempuan dalam Pelestarian Mangrove ini. Adapun buku Peran perempuan dalam Pelestarian Mangrove ini tidak akan selesai tanpa bantuan, diskusi dan dorongan serta motivasi dari beberapa pihak, walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan demikian, penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan serta perkembangan lebih lanjut pada *bookchapter* ini.

Wassalamu'alaikumsalam, Wr.Wb.

Sigli, 21 Juli 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I	
PENGERTIAN PERAN DAN KONSEP GENDER.....	1
A. Pengertian Peran.....	1
B. Pengertian Gender.....	10
C. Peran Gender.....	18
BAB II	
PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER.....	31
BAB III	
PEMBAGIAN KERJA BERDASARKAN GENDER.....	45
BAB IV	
PERAN PEREMPUAN DALAM PEKERJAAN PRODUKTIF DAN REPRODUKTIF.....	57
BAB V	
PERAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN SOSIAL BUDAYA/KEMASYARAKAT.....	73
BAB VI	
PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE.....	87

BAB VII	
TEORI PEMILAHAN PERAN	101
A. Teori Pembagian Kerja (<i>Division of Labour</i>): Emile Durkheim	104
B. Teori Tindakan Rasional: Max Weber	109
C. Teori Struktur Fungsional : Talcott Parsons	113
BAB VIII	
TEORI ANALISIS GENDER.....	117
BAB IX	
EKOSISTEM MANGROVE	129
BAB X	
KEBIJAKAN PUBLIK: GENDER, WILAYAH PESISIR DAN PELESTARIAN MANGROVE.....	139
A. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan .	139
B. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan.....	144
DAFTAR PUSTAKA	153

BAB I

PENGERTIAN PERAN DAN KONSEP GENDER

A. Pengertian Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarwono, 1991). Hal ini senada dengan istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mempunyai arti pemain sandiwarra (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat (Alwi, 2011).

Pengertian peran menurut Soekanto (2009) yaitu, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Status sering diakronimkan menjadi kedudukan,

yang mengindikasikan posisi seseorang secara sosial di masyarakat. Dengan kata lain, kedudukan memberikan seseorang sebuah peran sebagai pola interaksi dalam bersosialisasi (bermasyarakat). Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah hanya sebatas kepentingan ilmu pengetahuan. Tidak ada peran tanpa adanya kedudukan dan begitu juga tidak ada kedudukan yang tidak mempunyai peran di masyarakat secara langsung (Ralph, 1984).

Berdasarkan pengertian peran di atas, dapat disimpulkan bahwa teori peran berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak "mumpuni" dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai "tidak menyimpang" dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat (Suhardono, 1994).

Menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" peran mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Sarwono (2013:215).Teori peran (role theory) adalah teori yang "merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Selain dari psikolog, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam

sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bercermin sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu."

Biddle dan Thomas (1966) dalam Sarwono (1991), membagi peran menjadi empat golongan yaitu:

1. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Syarat-syarat peran menurut Soekanto (2009) mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:

1. meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan Peran posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
3. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka menimbulkan saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muncullah apa yang dinamakan peran (*role*).

Peran dalam teori sosial Parson (1990) didefinisikan sebagai harapan-harapan yang diorganisasi terkait dengan konteks interaksi tertentu yang membentuk orientasi motivasional individu terhadap yang lain. Melalui pola-pola kultural, cetak biru, atau contoh perilaku ini orang belajar siapa mereka di depan orang lain dan bagaimana mereka harus bertindak terhadap orang lain (Scott, 2011).

Vitalaya (2010) mengemukakan makna peran secara sederhana sebagai berikut :

1. Peran adalah aspek dinamis dari status yang sudah terpola dan berada disekitar hak dan kewajiban tertentu.
2. Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan suatu peran dipengaruhi oleh citra (*image*) yang ingin dikembangkan oleh seseorang. Dengan demikian, peran adalah keseluruhan pola

budaya yang dihubungkan dengan status individu yang bersangkutan.

4. Penilaian terhadap keragaan suatu peran sudah menyangkut nilai baik dan buruk, tinggi dan rendah atau banyak dan sedikit. Peran gender yang dibebankan pada seseorang atau sekelompok orang di dalam suatu masyarakat yang ditentukan oleh keadaan mereka sebagai perempuan dan atau lelaki yang sudah mencakup aspek penilaian.

Menurut Barbara (1995) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Menurut Horton dan Hunt (1993) seseorang mungkin tidak memandang suatu peran dengan cara yang sama sebagaimana orang lain memandangnya. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu merasakan peran tersebut. Tidak semua orang yang mengisi suatu peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini dapat bertentangan dengan peran lainnya. Semua faktor ini terpadu sedemikian rupa, sehingga tidak ada dua individu yang memerankan satu peran tertentu dengan cara yang benar-benar sama. Dapat dikatakan seseorang menjalankan suatu peran tertentu dengan cara yang berbeda-beda, dalam hal ini seperti perempuan pesisir dalam melakukan perannya akan sangat terlihat berbeda dengan perempuan tani dalam melakukan perannya, hal ini menggambarkan bahwa peran itu bersifat status sosial dimana seseorang yang mendapatkan status

sosial tersebut melakukannya dengan cara yang berbeda-beda.

Menurut Horton dan Hunt (1993), ada beberapa proses yang umum untuk memperkecil ketegangan peran dan melindungi diri dari rasa bersalah, yaitu antara lain:

1. Rasionalisasi

Rasionalisasi yaitu suatu proses defensif untuk mendefinisikan kembali suatu situasi yang menyakitkan dengan istilah-istilah yang secara sosial dan pribadi dapat diterima. Rasionalisasi menutupi kenyataan konflik peran, yang mencegah kesadaran bahwa ada konflik. Misalnya, orang yang percaya bahwa "semua manusia sederajat" tapi tetap merasa tidak berdosa memiliki budak, dengan dalih bahwa budak bukanlah "manusia" tetapi "benda milik".

2. Pengkotakan (*Compartmentalization*)

Pengkotakan (*compartmentalization*) yaitu memperkecil ketegangan peran dengan memagari peran seseorang dalam kotak-kotak kehidupan yang terpisah, sehingga seseorang hanya menanggapi seperangkat tuntutan peran pada satu waktu tertentu. Misalnya, seorang politisi yang diacara seminar berapipapi tentang pembelaan kepentingan rakyat, tapi di kantornya sendiri ia terus melakukan korupsi dan merugikan kepentingan rakyat.

3. Ajudikasi (*Adjudication*)

Ajudikasi yakni prosedur yang resmi untuk mengalihkan penyelesaian konflik peran yang sulit kepada pihak

ketiga, sehingga seseorang merasa bebas dari tanggung jawab dan dosa.

4. *Kedirian (Self)*

Kadang-kadang orang membuat pemisahan secara sadar antara peranan dan "kedirian" (*self*). *Kedirian (self)* dapat dikatakan sebagai kesadaran terhadap diri sendiri dan memandang adanya pribadi orang lain di luar dirinya.

Secara operasional, pengertian peran berarti keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan dan kemauan yang memadai, turut serta memutuskan tujuan dengan rasa tanggung jawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki atau kesadaran dalam melaksanakan kegiatan (Ruki, 2002).

Keseimbangan terjadi dalam masyarakat apabila peran dan kedudukan berjalan secara seimbang. Namun apabila semua orang mampu berperan sesuai peranannya, maka belum tentu masyarakat memberi peluang yang seimbang pula. Bahkan seringkali ditemukan masyarakat "terpaksa" membatasi peluang-peluang tersebut, seperti halnya yang terjadi pada kaum perempuan di perdesaan, semuanya berkaitan dengan kemampuan (potensi) yang melekat pada diri mereka. Potensi kemampuan sebagai daya dukung yang dimiliki secara khas oleh masing-masing individu, yang membuatnya mampu berperan sesuai atau tidak sesuai dengan kedudukannya.

Horoepoetri dan Santosa (2003) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*).
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biasess*).
5. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya "mengobati" masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya

perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Poerwadarminta (1995:751) adalah "tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa" Berdasarkan pendapat di atas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain".

Menurut Suhardono menjelaskan, "Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya".

Peran diartikan sebagai tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu didalam masyarakat yang makin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang

untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

B. Pengertian Gender

Secara etimologis kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Istilah gender diperkenalkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil (Mac Donald, et al., 1999). Untuk memahami konsep gender, harus ada pembedaan antara konsep gender itu sendiri dengan konsep jenis kelamin (*sex*). Jenis kelamin (*sex*) merupakan pembagian dua jenis kelamin pada laki-laki dan perempuan yang ditentukan secara biologis dan memiliki sifat-sifat permanen yang tidak dapat berubah dan ditukarkan antara keduanya. Sifat tersebut merupakan kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap laki-laki dan perempuan.

Fakih (2004) menyatakan gender adalah pemilahan peran, fungsi, kedudukan, tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang berfungsi untuk mengklasifikasikan perbedaan peran yang dikonstruksi secara sosial dan kultural oleh masyarakat, dan bersifat tidak tetap serta bisa dipertukarkan antar keduanya. Sedangkan menurut Vries (2006), gender adalah hasil kesepakatan antar manusia yang tidak bersifat kodrati, oleh karenanya gender bervariasi dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu waktu ke waktu berikutnya dan dapat dipertukarkan pada

manusia satu ke manusia lainnya tergantung waktu dan budaya setempat.

Konsep gender secara empiris dikembangkan pertama kali oleh Margaret Mead, seorang ahli antropologi dari Amerika.

Mead melakukan penelitian pada masyarakat primitif di Papua Nugini tahun 1932. Kesimpulan penelitian Mead menunjukkan bahwa perbedaan kepribadian dan perilaku antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat universal, tetapi ditentukan oleh kebudayaan, sejarah, dan struktur sosial masyarakat tertentu. Meskipun pada waktu itu belum mempergunakan istilah "gender", tetapi hasil penelitian Mead dianggap sebagai penelitian yang pertama mempermasalahkan gender (Koentjaraningrat, 1990).

Seorang sosiolog dari Inggris bernama Ann Oakley pertama kali yang membedakan antara konsep jenis kelamin dan gender pada tahun 1972 (Daulay, 2007). Menurut Oakley, jenis kelamin merujuk pada perbedaan atas dasar ciri-ciri biologis, sementara gender merupakan perbedaan simbolis atau sosial yang berpangkal pada perbedaan jenis kelamin. Sehingga gender diartikan sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan. Perbedaan ini menjadi sangat penting, sehingga konsep manusia terkait kodrati mengacu pada jenis kelamin, sedangkan perbedaan manusia yang bukan kodrati mengacu pada konsep gender.

Pengertian gender menurut Muhtar (2002), bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih (2008: 8) mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu (Saptari dan Halzner, 1997: 88).

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan (Abdullah, 2004 : 11).

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.¹ Didalam Webster's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional

antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakhri membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-laki dan perempuan, yang bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut dengan gender. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial.

Kata gender dalam istilah Indonesia sebenarnya diambil dari bahasa Inggris yaitu "gender" yang mana artinya tidak dapat dibedakan secara jelas mengenai seks dan gender. Banyak masyarakat yang mengidentikan gender dengan seks. Untuk memahami konsep gender, harus dapat dibedakan terlebih dahulu mengenai arti kata seks dan gender itu sendiri. Pengertian dari kata seks sendiri adalah suatu pembagian jenis kelamin ke dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, di mana setiap

jenis kelamin tersebut memiliki ciri-ciri fisik yang melekat pada setiap individu, di mana masing-masing ciri tersebut tidak dapat digantikan atau dipertukarkan satu sama lain. Ketentuan- ketentuan tersebut sudah merupakan kodrat atau ketentuan dari Tuhan

Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller, dan orang yang sangat berjasa dalam mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley. Menurutnya, gender merupakan behavioral differences (perbedaan perilaku) antara perilaku laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan dari ketentuan Tuhan (bukan kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. Pendefinisian gender lebih bersifat pada sosial budaya yaitu melalui proses kultural dan sosial, bukan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis seorang individu. Dengan demikian, gender senantiasa dapat berubah dari waktu – ke waktu, dari tempat –ke tempat, bahkan dari kelas- ke kelas, sedangkan seks atau jenis kelamin senantiasa tidak berubah.

Gender yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dapat ditentukan oleh pandangan masyarakat tentang hubungan antara lakilaki dan kelaki-lakian serta hubungan antara perempuan dan keperempuannya. Pada umumnya jenis kelamin laki-laki selalu dikaitkan dengan gender maskulin, sedangkan jenis kelamin perempuan selalu berkaitan dengan gender feminin. Akan tetapi hubungan – hubungan tersebut bukanlah suatu hubungan kolerasi yang bersifat absolut. Hal ini dikemukakan oleh Rogers

(1980). Gender tidak bersifat universal, namun bervariasi dari suatu masyarakat ke masyarakat yang lainnya, serta dari suatu waktu ke waktu. Gender tidak identik dengan jenis kelamin serta gender merupakan dasar dari pembagian kerja di seluruh masyarakat. Dari beberapa istilah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah sesuai dengan tempat, waktu atau zaman, suku, ras, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, serta ekonomi. Oleh karena itu, gender bukanlah kodrat dari Tuhan, melainkan buatan dari manusia yang dapat diubah maupun dipertukarkan serta memiliki sifat relatif. Hal ini terdapat pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin atau seks merupakan kodrat dari Tuhan yang berlaku di mana saja dan kapan saja yang tidak dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki dan wanita.

Puspitawati (2012), mendefinisikan gender sebagai suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi perempuan dan laki-laki.

Puspitawati (2012), membedakan konsep jenis kelamin dan gender. Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (sex)/Kodrati dan Gender/Bukan Kodrat dan Contohnya.

Jenis Kelamin (Seks) Contoh Kodrati	Gender Contoh Bukan Kodrati
1	2
Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa	Peran sosial bergantung pada waktu dan keadaan
Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh Tuhan dan kodrat	Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi buatan manusia
Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian alat-alat reproduksi. Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat reproduksi, maka perempuan mempunyai fungsi reproduksi seperti mensturasi, hamil, melahirkan dan menyusui; sedangkan laki-laki mempunyai fungsi membuahhi (<i>spermatozoid</i>)	Menyangkut perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan dari masyarakat. Sebagai konsekuensi dari hasil kesepakatan masyarakat, maka pembagian peran laki-laki adalah mencari nafkah dan bekerja di sektor publik, sedangkan peran perempuan disektor domestik dan bertanggung jawab masalah rumah tangga
Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan; sebaliknya sekali menjadi laki-laki, mempunyai penis, maka selamanya menjadi laki-laki.	Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumahtangga dapat berubah menjadi pekerja/pencari nafkah, disamping masih menjadi istri juga

Jenis Kelamin (Seks) Contoh Kodrati	Gender Contoh Bukan Kodrati
1	2
Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin peran laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi	Peran sosial dapat dipertukarkan untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami dalam keadaan menganggur tidak mempunyai pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumahtangga, semestara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW).
Membuahi	Bekerja di dalam rumah dan di bayar (pekerjaan publik/ produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, menjahit/ <i>tailor</i> , mencuci pakaian/ <i>loun dry</i> mengasuh dan mendidik anak orang lain (<i>babby sitter/ pre-school</i>)
Mensturasi	Bekerja diluar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar rumah)
Mengandung/hamil	Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan domestik rumah tangga) seperti memasak, menyapu halaman, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, menjahit pakaian keluarga.

Jenis Kelamin (Seks) Contoh Kodrati	Gender Contoh Bukan Kodrati
1	2
Melahirkan anak bagi perempuan	Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial kemasyarakatan) bagi laki-laki dan perempuan
Menyusui anak/bayi dengan payudaranya bagi perempuan	Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik, membaca kan buku cerita, menemani tidur.Menyusui anak bayi dengan menggunakan botol bagi laki-laki atau perempuan.
Sakit prostat untuk laki-laki	Mengangkat beban, memindahkan barang, membetulkan perabot dapur, memperbaiki listrik dan lampu, memanjat pohon/pagar bagi laki-laki atau perempuan
Sakit kanker Rahim untuk perempuan	Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, dokter, tentara militer, koki, guru TK/SD, memilih program studi SMK-Teknik industry, memilih program studi memasak dan merias bagi laki-laki atau perempuan.

Sumber : Puspitawati (2012).

C. Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya

dan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang 15 dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki, empat jenis peran dalam gender, yaitu :

1. Peran Gender

Peran gender adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status, lingkungan, budaya dan struktur masyarakatnya. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki. Peran laki-laki dan perempuan dibedakan atas peran produktif, reproduktif dan sosial.

2. Peran Produktif

Peran Produktif merujuk kepada kegiatan yang menghasilkan barang dan pelayanan untuk konsumsi dan perdagangan (Kamla Bhasin, 2000). Semua pekerjaan di pabrik, kantor, pertanian dan lainnya yang kategori aktivitasnya dipakai untuk menghitung produksi nasional bruto suatu negara. Meskipun perempuan dan laki-laki keduanya terlibat di dalam ranah publik lewat aktivitas produktif, namun masyarakat tetap menganggap pencari nafkah adalah laki-laki. Contoh di sebuah kantor, bila terjadi PHK maka seringkali perempuanlah yang dikorbankan karena dianggap kegiatan laki-laki yang menghasilkan uang. Bila merujuk pada definisi kerja sebagai aktivitas yang menghasilkan pendapatan baik dalam bentuk uang maupun barang maka aktivitas perempuan dan

laki-laki baik di sektor formal maupun informal, di luar rumah atau di dalam rumah sepanjang menghasilkan uang atau barang termasuk peran produktif.

3. Peran Reproduksi

Peran reproduktif dapat dibagi mejadi dua jenis, yaitu biologis dan sosial. Reproduksi biologis merujuk kepada melahirkan seorang manusia baru, sebuah aktivitas yang hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Reproduksi sosial merujuk kepada semua aktivitas merawat dan mengasuh yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan bertahannya hidup (Kamla Bhasin, 2000). Dengan demikian, aktivitas reproduksi ialah aktivitas yang mereproduksi tenaga kerja manusia. Merawat anak, memasak, memberi makan, mencuci, membersihkan, mengasuh dan aktivitas rumah tangga lainnya masuk dalam kategori ini.

Peran gender adalah peran yang diciptakan oleh masyarakat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki diharapkan melakukan peran yang bersifat instrumental atau berorientasi pada pekerjaan untuk memperoleh nafkah, sedangkan perempuan melakukan peran yang bersifat ekspresif yang berorientasi pada emosi manusia (Megawangi, 1999). Peran gender terbentuk melalui berbagai sistem nilai, termasuk nilai-nilai adaptasi, pendidikan, agama, politik, ekonomi dan sebagainya.

Peran gender merujuk pada peran yang dikonstruksikan masyarakat dan perilaku-perilaku yang dipelajari serta harapan-harapan yang dikaitkan pada perempuan dan

pada laki-laki. Perempuan dan laki-laki secara biologis berbeda. Kebudayaan kemudian menafsir dan mengurai perbedaan yang dibawa dari lahir ini ke dalam sejumlah pengharapan masyarakat tentang perilaku dan tindak kegiatan yang dianggap pantas bagi perempuan dan laki-laki serta hak, sumber daya, dan kekuasaan yang layak mereka miliki. Seperti perempuan yang ditempatkan dalam wilayah domestik tersebut telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan yang tersosialisasi di masyarakat bahwa kaum perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan domestik. Sedangkan laki-laki tidak harus bertanggung jawab, dan bahkan banyak tradisi secara adat dilarang terlibat dalam urusan pekerjaan domestik. Oleh karenanya, tipologi beban kerja perempuan tidak berkurang walaupun si perempuan juga bekerja di sektor publik. Hal ini disebabkan selain bekerja di luar (publik), perempuan juga masih harus bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan domestik.

Persepsi peran gender dalam sektor domestik

1. Contoh laki-laki dan perempuan mempersepsikan peran berbelanja bahan makanan dan memasak serta menyiapkan makanan dan keperluannya sebagai peran yang lebih baik dilakukan oleh perempuan.
2. Contoh laki-laki dan perempuan mempersepsikan peran pengasuhan anak, membersihkan lingkungan rumah, perencanaan dan pengaturan keuangan, pengambilan keputusan dalam keluarga, domestik subsisten, merawat kesehatan, dan menyediakan air

sebagai peran yang lebih baik dilakukan baik laki-laki maupun perempuan (netral).

3. Contoh laki-laki dan perempuan mempersepsikan peran memperbaiki alat, memelihara peralatan rumah, dan menggunakan sarana sebagai peran yang lebih baik dilakukan oleh laki-laki.

Scanzoni (1981) dalam Supriyantini (2002), membedakan pandangan peran gender menjadi dua bagian, yaitu:

1. Peran gender tradisional

Pandangan ini membagi tugas secara kaku berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki yang mempunyai pandangan peran gender tradisional tidak ingin perempuan menyamakan kepentingan dan minat diri sendiri dengan kepentingan keluarga secara keseluruhan. Istri diharapkan mengakui kepentingan dan minat suami adalah untuk kepentingan bersama dalam arti lain kekuasaan kepemimpinan dalam keluarga berada ditangan suami.

2. Peran gender modern

Tidak ada lagi pembagian tugas yang berdasarkan jenis kelamin, kedua jenis kelamin diperlakukan sejajar. Cara pandang ini melahirkan konsep androgini dalam diri individu. Androgini adalah kondisi sosial dan psikologis dimana individu dapat berpikir, merasa dan bertindak laku secara instrumental maupun ekspresif tanpa terikat pada jenis kelaminnya, sehingga dapat melakukan berbagai peran secara fleksibel.

Istilah gender terkait dengan istilah feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan, ditempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut (Bhasin dan Khan, 1995; Fakhri, 2004). Gerakan feminisme dapat dibagi menjadi tiga aliran, yaitu:

1. Feminisme Radikal

Aliran gerakan ini berupaya menentang struktur masyarakat yang dibangun berdasarkan jenis kelamin. Dominasi dan hegemoni kaum laki-laki dianggap sebagai sebuah bentuk penindasan terhadap kaum perempuan. Menurut para pendukung aliran ini, dominasi dan hegemoni kaum laki-laki tidak hanya terjadi dalam kegiatan publik, namun juga hingga ke ruang pribadi di dalam rumah tangga.

Feminisme radikal mendasari pemikirannya atas dua keyakinan sentral terhadap ketidak setaraan (penindasan gender), yaitu: (1) bahwa perempuan mempunyai nilai positif mutlak sebagai perempuan, suatu keyakinan yang ditegaskan untuk menentang apa yang mereka nyatakan sebagai devaluasi perempuan universal; dan (2) bahwa perempuan dimana-mana ditindas dengan keras oleh sistem patriarki (Lerner, 1986 dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

Sasaran utama analisis ini adalah citra patriarki sebagai praktek kekerasan oleh lelaki dan oleh organisasi yang didominasi oleh lelaki atas perempuan. Kekerasan tidak

selalu berbentuk kekejaman fisik lahiriah. Kekerasan dapat tersembunyi dibalik praktik eksploitasi dan kontrol yang lebih kompleks, dibalik standar mode dan kecantikan, dibalik gagasan tirani keibuan, dibalik praktik ginekologi, ilmu kebidanan dan psikoterapi, dibalik pekerjaan rumah tangga yang tidak diupah, dan dibalik pekerjaan yang diupah tetapi diupah rendah (Mac.Kinnon, 1979; Thompson, 1994; Wolf, 1991; dalam Ritzer dan Goodman, 2004). Kekerasan muncul bila satu kelompok mengendalikan peluang hidup, lingkungan, tindakan dan persepsi kelompok lain untuk kepentingannya sendiri, seperti yang dilakukan lelaki terhadap perempuan.

Untuk mengalahkan sistem patriarki ini, menurut feminis radikal harus dimulai dengan memfungsikan kembali kesadaran mendasar perempuan sehingga setiap perempuan mengakui nilai dan kekuatan dirinya sendiri, menolak tekanan patriarki yang melihat diri perempuan itu lemah, tergantung, dan kelas kedua (*second class*), dan bekerja dalam kesatuan dengan perempuan lain, menggalang semangat persaudaraan saling percaya, dan saling membela (Chasteen, 2001; McCaughey, 1997 dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

2. Feminisme Liberal

Ekspresi utama dari teori ketimpangan gender adalah feminisme liberal. Aliran gerakan ini memandang adanya ketidakadilan terhadap kaum perempuan di dalam masyarakat. Aliran ini menentang pandangan yang menyebutkan bahwa perbedaan antara kaum lelaki dengan perempuan, terletak atau berpangkal pada perbedaan

biologis yang kemudian menimbulkan perbedaan kesempatan dalam hal pengembangan diri secara rasional. Aliran ini berargumen bahwa, perempuan bisa mengklaim kesamaan dengan lelaki atas dasar kapasitas esensial manusia sebagai agen moral yang bernalar, bahwa ketimpangan gender adalah akibat dari pola seksis dan patriarkis dari divisi kerja, dan bahwa kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengubah divisi kerja melalui pemolaan ulang institusi-institusi kunci, hukum, pekerjaan, keluarga, pendidikan dan media (Bern, 1993; Schaeffer, 2001 dalam Ritzer dan Goodman, 2004).

Berdasarkan konsepsi di atas, maka kaum feminisme liberal mendasari keyakinan mereka bahwa: (1) semua manusia mempunyai ciri esensial tertentu, yaitu sebagai agen moral dan nalar serta aktualisasi diri; (2) pelaksanaan kapasitas ini dapat dijamin melalui pengakuan legal atas hak-hak universal; (3) ketimpangan antara laki-laki dan perempuan adalah diciptakan secara sosial (*socially constructed*), dan tidak ada dasarnya dalam alam; (4) perubahan sosial untuk kesetaraan dapat dicapai dengan mengajak publik yang rasional dan dengan menggunakan negara. Oleh karena itu menurut pendukung aliran ini, pembukaan kesempatan kerja dan kesempatan memperoleh pendidikan (formal) adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Ada dua cara dalam konsep aliran ini yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan mereka, yaitu: (1) membangkitkan kesadaran individu perempuan tentang hak-hak mereka dan (2) menuntut pembaharuan-

pembaharuan hukum yang tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.

3. Feminisme Sosialis

Aliran ini lebih mengarahkan pandangannya pada kaitan dominasi kaum laki-laki dengan sistem kapitalisme. Menurut pandangan pendukung aliran ini, dominasi kaum lelaki terhadap kaum perempuan terjadi oleh karena proses kapitalisme. Proses kapitalisme dalam pandangan mereka telah menyebabkan terjadinya eksploitasi kerja terhadap kaum perempuan. Peran perempuan yang harus turut membantu mencari nafkah bagi keluarganya dianggap sebagai bentuk eksploitasi oleh sang suami, sementara dalam dunia kerja dimana kaum perempuan ditempatkan sebagai buruh murah dianggap oleh aliran ini sebagai bentuk eksploitasi oleh majikan. Pada dasarnya, inti aliran ini tidak terletak pada perjuangan untuk menghilangkan dominasi kaum lelaki atas kaum perempuan dalam sistem patriarki, tetapi lebih pada perubahan sistem sosial ekonomi (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut feminisme sosialis, perempuan adalah aspek sentral dalam dua hal penting, yaitu: (1) seperti feminisme lainnya, penindasan perempuan tetap merupakan topik utama untuk dianalisis, (2) lokasi dan pengalaman perempuan terhadap dunia berfungsi sebagai sudut pandang esensial terhadap dominasi dalam segala bentuknya (Ritzer dan Goodman, 2004).

Menurut Saptari dan Holzner (1997), ketiga aliran gerakan feminisme tersebut memberikan beberapa

pandangan pokok tentang studi perempuan, yaitu: (1) adanya pengakuan keanekaragaman perempuan atas kelas, ras atau nasionalisme yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan politik mereka; (2) adanya fokus pada diskriminasi seksual di tempat kerja atau di rumah tangga berkaitan dengan konteks ekonomi politik masyarakat tersebut; (3) adanya pengaitan ideologi patriarki dengan sistem produksi dari masyarakat yang bersangkutan; (4) adanya pengakuan bahwa sumber dominasi laki-laki bisa terjadi di dalam rumah (tidak hanya di tempat kerja) sehingga perlu menjadi sorotan perhatian ilmiah dan aktivis; (5) perlunya fokus pada konstruksi sosial dari seksualitas dan melihat pengaruhnya terhadap kehidupan perempuan di berbagai bidang; (6) adanya penolakan terhadap biologisme (yang melihat bahwa perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan dibentuk oleh perbedaan biologis) yang terdapat dalam pemikiran awam; (7) perlunya dilakukan banyak studi di tingkat mikro untuk menembus ketersembunyian perempuan dan menunjukkan bahwa perempuan sebenarnya memberikan sumbangan yang sangat penting dalam segala aspek kehidupan; (8) perlunya mengaitkan penelitian mikro dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat makro.

Pada dasarnya feminisme dalam hal ini dimaksudkan sebagai kesadaran akan posisi perempuan yang rendah dalam masyarakat dan keinginan untuk memperbaiki atau mengubah keadaan tersebut sehingga mencapai kesederajatan/kesetaraan, harkat, serta kebebasan perempuan untuk memilih dan mengelola kehidupan baik

di dalam maupun di luar rumah tangga (Bashin dan Khan, 1995).

Dengan demikian gender menyangkut aturan sosial yang berkaitan dengan jenis kelamin manusia laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis dalam hal alat reproduksi antara laki-laki dan perempuan membawa konsekuensi fungsi reproduksi yang berbeda (perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui, sedangkan laki-laki membuahi dengan spermatozoa). Jenis kelamin ini merupakan ciptaan Tuhan, bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan dan berlaku sepanjang zaman (Puspitawati, 2012).

Di Indonesia, perubahan penggunaan istilah wanita menjadi perempuan terjadi di awal reformasi. Ada sebagian kalangan yang menafsirkan perubahan penggunaan kata wanita ke perempuan merupakan simbolisasi perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dengan menggunakan perspektif historis, para penganut pandangan ini melihat penggunaan istilah wanita pada masa orde baru merupakan antithesis atas penggunaan istilah perempuan pada masa Jepang yang memperlihatkan realita dimana kaum hawa mengalami penindasan. Adapun perubahan penggunaan kata perempuan di era reformasi kemudian dipandang sebagai keberhasilan perjuangan mengungkap realita bahwa masih banyak penindasan dan ketidakadilan terhadap perempuan. Perempuan tetap belum merdeka meskipun Indonesia telah lepas dari penjajah (Ahdiah, 2013).

Kata wanita dalam etimologi Jawa, berasal dari frasa 'Wani Ditoto' atau berani diatur. Sebutan wanita dimaknai berdasarkan kemampuannya untuk tunduk dan patuh pada lelaki sesuai dengan perkembangan budaya di tanah Jawa pada masa tersebut. Sementara itu menurut bahasa Sansekerta, kata perempuan muncul dari kata per – empu-an. 'Per' memiliki makna makhluk dan 'Empu' artinya mulia, tuan, atau mahir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna kata perempuan adalah makhluk yang mulia, atau memiliki kemampuan. Perubahan penggunaan kata wanita menjadi perempuan dianggap simbolisasi perempuan yang semula diposisikan sebagai objek menjadi subjek. Maka jika yang dimaksudkan adalah sosok yang mengalah, rela menderita demi pria pujaan, patuh berbakti, maka kata yang dipilih adalah wanita, tetapi jika berbicara soal peranan dan fungsinya, soal pemberdayaan kedudukan, soal pembelaan hak asasi, soal nasib dan martabatnya, maka kata yang digunakan adalah perempuan (Sudarwati dan Jupriono, 2011).

Sementara peran gender sendiri sebagai sebuah karakteristik memiliki determinan lingkungan yang kuat dan berkaitan dengan dimensi maskulin versus 10 feminine, Stewart & Lykes, dalam Saks dan Krupat, (1998). Ketika berbicara mengenai gender, beberapa konsep berikut ini turut terlibat di dalamnya :

- a. Gender *role* (peran gender), merupakan definisi atau preskripsi yang berakar pada kultur terhadap tingkah laku pria atau wanita.

- b. Gender *identity* (identitas gender), yaitu bagaimana seseorang mempersepsi dirinya sendiri dengan memperhatikan jenis kelamin dan peran gender.
- c. Serta *sex role ideology* (ideologi peran-jenis kelamin), termasuk di antaranya stereotipe-stereotipe gender, sikap pemerintah dalam kaitan antara kedua jenis kelamin dan status-status relatifnya, Segall, Dasen, Berry, & Poortinga, dalam Wathani (2009).

BAB II

PERSPEKTIF KESETARAAN GENDER

Secara konseptual kesetaraan (*equality*) diartikan sebagai suatu keadaan menjadi setara atau sama dalam ukuran, jumlah, kuantitas, nilai, kualitas atau tingkatan (Balasong, *et al.*, 1996). Kesetaraan sebagai suatu prinsip telah menjadi sesuatu yang umum, tetapi sebagai adat kebiasaan tidak pernah terjadi. Konsep kesetaraan dapat teraplikasikan dalam kehidupan masyarakat apabila di suatu negara yang mengklaim dirinya sebagai bangsa yang menjunjung tinggi hak azasi manusia dan demokrasi adalah negara yang menunjukkan perempuan dilindungi oleh hukum dalam berbagai hal termasuk gender (Pandu, 2006). Hal senada juga dikemukakan oleh Puspitawati (2012), bahwa kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki untuk menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan prinsip dasar dalam berbagai kegiatan baik di dunia publik, maupun di dunia domestik. Dalam kaitan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan maka dikenal pula suatu konsep kesetaraan yaitu "kesetaraan gender (*Gender Equality*)". Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan

hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional (Nugroho, 2008).

Kesetaraan erat kaitannya dengan keadilan. Keadilan (*equity*) diartikan sebagai keadilan di dalam, dihadapan, dibawah hukum dan undang-undang (*justice*), sedangkan kesetaraan (*equality*) diartikan sebagai kondisi untuk menjadi setara atau sama (Sinta, 2005). Konsep keadilan mengandung arti suatu keadaan seimbang dimana perbedaan-perbedaan harus diimbangi, sedangkan kesetaraan adalah lebih menunjukkan pada hal-hal dan bentuk-bentuk kelengkapan agar tercapai kesamaan-kesamaan dalam berbagai kesempatan, misalnya adanya hukum yang tidak memihak pada salah satu pihak, golongan, kelompok, etnik, adanya kebiasaan-kebiasaan yang tidak memihak pada salah satu jenis kelamin yang bersifat berat sebelah (Fakih, 2004).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN dan UNFPA (2005), menyatakan bahwa ketidakadilan gender dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yaitu:

1. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses peminggiran/penyingkiran terhadap suatu kaum yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan pelemahan ekonomi kaum tertentu. Marginalisasi terjadi karena berbagai hal, seperti kebijakan pemerintah, keyakinan, agama, tradisi, kebiasaan, bahkan karena asumsi ilmu pengetahuan.

Contohnya, banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan petani laki-laki. Perempuan dipinggirkan dari berbagai jenis kegiatan pertanian dan industri yang lebih memerlukan keterampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki laki-laki, dan perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki, dalam hal ini banyak kaum pria yang beranggapan bahwa perempuan hanya mempunyai tugas di sekitar rumah saja.

2. Subordinasi

Subordinasi memiliki pengertian yaitu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya. Sejak dahulu terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan yang lebih rendah dari laki-laki. Salah satu contohnya yaitu, perempuan dianggap makhluk yang lemah, sehingga sering kali kaum laki-laki bersikap seolah-olah berkuasa (perempuan tidak mampu mengalahkan kehebatan laki-laki). Kadang kala kaum laki-laki beranggapan bahwa ruang lingkup pekerjaan kaum perempuan hanyalah di sekitar rumah. Dengan pandangan seperti itu, maka sama halnya dengan tidak memberikan kaum perempuan untuk mengapresiasi pikirannya di luar rumah.

3. Pandangan stereotipe

Stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap kaum tertentu. Akan tetapi pada permasalahan gender, stereotipe lebih mengarah pada pelabelan yang bersifat negatif terhadap perempuan. Hal ini terjadi karena pemahaman yang keliru terhadap posisi perempuan. Salah satu stereotipe yang berkembang, adalah pandangan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perempuan yaitu hanya melaksanakan pekerjaan domestik saja atau kerumahtanggaan. Hal ini tidak hanya terjadi dalam lingkup rumah tangga tetapi juga di tempat kerja, masyarakat, bahkan ditingkat pemerintah dan negara.

Apabila seorang laki-laki marah, ia dianggap tegas, tetapi bila perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda, namun standar nilai tersebut banyak menghakimi dan merugikan perempuan. Label kaum perempuan sebagai "ibu rumah tangga" merugikan, jika hendak aktif dalam "kegiatan laki-laki", seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (*bread winner*), mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.

4. Kekerasan (*violence*)

Kekerasan (*violence*) adalah serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang.

Kekerasan karena bias gender disebut *gender related violence*. Kekerasan tersebut terjadi karena disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Bentuk-bentuk kekerasan (*violence*) gender (terhadap perempuan) antara lain: pemerkosaan, serangan fisik dalam rumah tangga, kekerasan dalam pelacuran dan pornografi, pemaksaan dalam strerilisasi keluarga berencana (KB), serta pelecehan seksual (Fakih, 2004).

5. Beban Ganda

Beban kerja ganda disebabkan oleh anggapan bahwa perempuan lebih cocok mengurus dan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik (menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangga, memasak, mencuci, bahkan memelihara anak). Pekerjaan domestik dianggap tidak bernilai dan lebih rendah bila dibandingkan dengan pekerjaan laki-laki karena tidak produktif. Konsekuensi tersebut harus diterima oleh perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dan disisi lain harus bertanggungjawab atas rumah tangganya. Hal inilah yang menyebabkan bahwa gender menjadikan perempuan menanggung beban kerja yang bersifat ganda.

Dengan demikian, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Keduanya mempunyai hak yang sama dalam memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan. Pada akhirnya

laki-laki dan perempuan akan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Di dasari bahwa isu gender merupakan isu yang masih melekat dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan respons yang tidak proposional tentang gender. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya kesenjangan gender adalah macam- macamnya tafsiran tentang pengertian gender. Dari kondisi yang ada saat ini, diamati bahwa masih terjadi ketidakjelasan dan kesalahpahaman tentang pengertian gender dalam kaitannya dengan usaha emansipasi perempuan. Maka perlu mengetahui secara jelas konsep gender dan perkembangannya dalam masyarakat.

Tidak hanya terbatas pada perempuan saja, akan tetapi juga laki- laki. Ksetaraan adalah gagasan dasar, tujuan dan misi utama peradaban manusia untuk mencapai kesejahteraan, membangun keharmonisan kehidupan masyarakat, bernegara dan membangun keluarga berkualitas. Pada umumnya membahas gender Ksetaraan gender adalah sebuah frase (Istilah) yang sering diucapkan oleh pejabat para aktivis sosial, kaum feminis, politikus, bahkan hampir oleh para pejabat Negara yang mengartikan ksetaraan gender sebagai konsisi "ksetaraan" yang dialami oleh para perempuan atau tidak adanya diskriminasi perempuan.

Gabylen Rubin, tercatat pertama kali mempopulerkakan konsep ksetaraan gender, yang memdefiniskan gender adalah pembedaan peran perempuan dan laki-laki di mana yang membentuk adalah konstruksi sosial dan kebudayaan,

jadi bukan konstruksi sosial dan kebudayaan, jadi bukan konstruksi yang dibawa sejak lahir.

Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dengan demikian mereka memiliki (APKM) akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil. Memiliki akses dan partisipasi berarti memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. Kebijakan pemerintah tentang gender harus disosialisasikan pada aspek pembangunan misalkan pendidikan, budaya, ekonomi, politik dan lain-lain.

Perempuan, bukan menerima saja kenyataan hidup. Kesalahan utama yang dilakukan para politisi, peneliti dan kaum feminis, adalah mereproduksi struktur patriarki dengan menekankan wacana ketimpangan gender, perempuan sebagai makhluk lemah, tergantung dan halus. Dengan kata lain, melacak akar persoalan pendidikan berbias gender dimulai di keluarga, dilanjutkan di dunia pendidikan. Proses pembangunan terbukti telah memarginalkan perempuan. Proses marginalisasi ini berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan atau penafsiran ajaran agama, tradisi kebiasaan dan bahkan dari asumsi ilmu pengetahuan.

Kesetaraan gender dan keadilan gender mempunyai pengertian yang berbeda antara keduanya. Kesetaraan gender jika ditinjau dari bahasa Inggris diartikan sebagai *gender equality*, yang mempunyai arti persamaan dalam hal. Definisi kesetaraan gender adalah memberi kesempatan, pada perempuan dan laki-laki untuk setara atau sebanding menikmati kesempatan atas hak-haknya, mempunyai benda-benda kepemilikan, sumber daya, dan saling dapat manfaat dari hasil pembangunan (Puspitawati, 2012:52).

Keadilan gender pada bahasa Inggris diartikan dengan *gender equity*. Definisi keadilan gender adalah sebuah proses atau usaha untuk memberi rasa adil pada perempuan maupun laki-laki. Strategi keadilan gender pada akhirnya ditujukan guna meningkatkan kesetaraan gender. Keadilan sebagai sebuah cara, kesetaraan merupakan hasilnya (Puspitawati, 2012:53). Dapat dilihat bahwa kesetaraan gender serta keadilan gender merupakan satu kesatuan untuk mewujudkan suatu kondisi di mana laki-laki serta perempuan dapat setara, seimbang serasi serta harmonis. Guna mencapai hal itu, keadilan digunakan sebagai sebuah cara untuk mencapai sebuah hasil, yang berwujud kesetaraan gender.

Kesetaraan gender (*gender equity*) adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki

kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui affirmative action. (Mufidah, 2012 : 9).

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. (Mursidah, 2013 : 164).

Perhatian terhadap permasalahan gender mulai muncul sekitar tahun 40-an yang digagas oleh kaum feminis di Barat. Munculnya perhatian terhadap isu gender dan pemberdayaan perempuan diawali oleh adanya kesadaran bahwa ternyata nasib kaum perempuan di masyarakat tidak sebaik nasib lawan jenisnya. Oleh karena itu, gerakan untuk memperbaiki nasib perempuan mulai muncul yang dipelopori oleh tokoh feminis Mary Wollstonecraft dan John Stuart Mill. Perkembangan berikutnya diikuti oleh tokoh-tokoh feminis lainnya yang mempunyai visi dan misi sejenis yakni mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperjuangkan nasib kaum perempuan yang dianggapnya berada dalam posisi teropresi, ter subordinasi, termarginalisasi, dan terdiskriminasi. Gerakan feminis ini pada awalnya berkembang di Negara Barat seperti di Inggris, Perancis, Amerika dan lainlain, dan dalam

perkembangannya gerakan ini berkembang dalam tiga gelombang besar yakni feminisme gelombang pertama, kedua dan ketiga. Feminisme gelombang pertama berkaitan dengan terjadinya Revolusi Perancis (1789) dimana pada saat ini berkembang beberapa paham feminis seperti; feminis Liberal, feminisme Radikal dan feminisme Marxis/Sosialis. Memahami keteropresian perempuan, masing-masing feminis ini mempunyai pandangan yang berbeda. Feminisme Liberal memandang bahwa keterbelakangan perempuan disebabkan karena adanya tradisi dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai mahluk yang tersubordinasi bukan karena kondisi alamiah yang dimilikinya. Sementara itu, feminisme Radikal memandang ketertindasan perempuan karena seksualitas dan sistem gender yang akhirnya memunculkan system patriarkhi, sedangkan feminisme Marxis memandang keteropresian perempuan disebabkan karena struktur sosial, ekonomi dan politik yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme.

Feminisme gelombang kedua dikembangkan oleh Simone de Beauvoir yang gerakannya dikenal dengan feminisme Eksistensialis. Faham ini melihat persoalan penindasan perempuan dimulai dengan adanya beban reproduksi di tubuh perempuan. Menurutnya beban reproduksi yang ditanggung perempuan dan tanggung jawab membesarkan anak membuat perempuan mempunyai posisi tawar yang lemah terhadap laki-laki. Sementara feminisme gelombang ketiga dikenal dengan

feminisme Postmoderen, feminisme Multikultural dan Ekofeminisme.

Perbedaan gender dalam pandangan kaum feminis sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur yang di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender menurut Mansour Fakih termanifestasikan dalam berbagai bentuk seperti marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam putusan politik, pembentukan stereotip atau melalui pelabelan negatif dan sebagainya (Fakih, 1996:12-13). Feminisme kemudian mengangkat tema peran ganda perempuan sebagai upaya untuk menyelesaikan ketidakadilan yang dirasakan perempuan. Meskipun harus diperhatikan bahwa feminisme bukan merupakan aliran yang monolitik, Namun sebagian besar masih beranjak dari pemilahan antara wilayah publik dan domestik yang melahirkan konsep peran ganda. Menurut Marilyn French, melihat bahwa upaya feminisme dalam menyrot masalah keperempuanan bukannya tidak meninggalkan masalah. (Wibowo, 2011 : 360).

Perwujudan kesetaraan gender harus didukung oleh semua elemen masyarakat terutama oleh institusi pendidikan formal yang menjadi basis pelaksanaan pendidikan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan harus diberikan porsi yang tepat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Posisi ataupun

jabatan publik tidak harus didominasi oleh laki-laki tetapi perempuan harus diberikan ruang yang sama. Alasan agama, sosial dan kultural tidak lagi menjadi dasar argumentasi untuk memarjinalkan perempuan.

Kesetaraan atau keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan juga harmonis. Kondisi ini akan terwujud jika adanya perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Wujud kesetaraan gender adalah:

1. Akses, ialah kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.
2. Partisipasi, perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
3. Kontrol, perempuan dan laki-laki memiliki kekuasaan yang sama pada sumber daya pembangunan.
4. Manfaat, pembangunan harus memiliki manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana terjadi kesetaraan atau keadilan sosial antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan sosial ini meliputi pelakuan yang sama dengan menentang subordinasi perempuan terhadap laki-laki di lingkungan rumah tangga mereka, menentang status yang rendah di tempat kerja, melawan pemerasan dalam keluarga, dalam masyarakat serta dalam agama dan menentang beban ganda yang mereka tanggung dalam produksi dan reproduksi (Putriyani, 2011: 25).

Pemaknaan kesetaraan gender dalam pengertian yang umum tersebut berarti penerimaan martabat kedua jenis

kelamin dalam ukuran yang setara. Dimana orang harus tahu bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak-hak setara dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Keduanya memiliki hak yang setara dalam tanggung jawab sebagaimana dalam hal kebebasan. Dengan demikian, kesetaraan gender merupakan penilaian yang sana yang diberikan masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan dan laki-laki dan atas berbagai peran yang mereka jalani (Putriyani, 2011: 25).

BAB III

PEMBAGIAN KERJA BERDASARKAN GENDER

Pembagian kerja berdasarkan gender adalah semua konsep dan praktik pada masyarakat tertentu yang membagi peranan dan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin. Menurut Wilson (1975) dalam bukunya "*The New Synthesis*", menyatakan pembagian kerja secara seksual adalah sesuatu yang wajar, bersumber pada perbedaan struktur genetik dari laki-laki dan perempuan. Perempuan diidentikkan dengan pekerjaan ringan dan tidak banyak menuntut kekuatan fisik atau pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Sedangkan laki-laki diidentikkan dengan pekerjaan yang kasar, yang membutuhkan kekuatan fisik dan otot.

Hal yang sama dikemukakan oleh Durkheim (1893), dalam Johnson (1988) bahwa pembagian kerja dalam masyarakat modern tidak hanya berhenti pada pembagian jenis-jenis kerja, tetapi juga pembagian kerja secara seksual, dimana terjadi pembagian kerja berdasarkan perbedaan laki-laki dan perempuan, disesuaikan dengan keadaan dan kondisi fisik yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, seperti tingkah laku, kemampuan, keahlian dan kualitas.

Pada akhirnya, perempuan semakin dibawa pada peran domestiknya dalam rumah tangga dan semakin terpisah dari peran publik (Nugroho, 2008). Kenyataan ini

mengarah pada isu posisi tawar menawar antara laki-laki dan perempuan bahwa laki-laki lebih diuntungkan karena perempuan tidak mendapat penghasilan dari pekerjaannya.

Sejarah pembagian kerja secara seksual menunjukkan bahwa pada suatu masa kaum perempuan pernah lebih "berkuasa" dibandingkan dengan kaum laki-laki. Budiman (1985), mengutip pendapat Ernestine Friedl, seorang antropologi, yaitu: "di dalam masyarakat primitif, perempuan lebih penting daripada laki-laki. Pada masyarakat primitif, ketika manusia hidup masih mengembara dalam kelompok-kelompok kecil, bahaya yang paling besar adalah musnahnya kelompok itu karena matinya anggota kelompok ini satu-satu. Karena itu, jumlah anggota kelompok harus sedapat-dapatnya diperbesar, dengan melahirkan bayi-bayi".

Karena kebutuhan untuk mempertahankan kesinambungan kehidupan kelompok, maka kaum perempuan dianggap relatif lebih penting daripada kaum laki-laki. Karena tugasnya untuk melahirkan, kaum perempuan mendapat perlindungan dan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban untuk melakukan pekerjaan berbahaya, dan karena itu harus tinggal dirumah. Ini pembagian kerja berdasarkan seksual yang pertama-tama, dimana kaum laki-laki harus bekerja di luar rumah, dan kaum perempuan bekerja di dalam rumah tinggal yang relatif aman (Budiman, 1982).

Pembagian kerja secara seksual, kemudian menimbulkan paham genderisme yang berpandangan bahwa sudah "kodrat" perempuan untuk bekerja dalam

sektor domestik dan menjadi subordinat dari laki-laki dalam struktur masyarakat. Pandangan ini dianut secara sadar atau tidak oleh sebagian besar masyarakat di dunia, karena memang kebudayaan yang ada menganggap laki-laki lebih superior dan memiliki kekuasaan dari pada perempuan. Pembagian kerja secara seksual tersebut merupakan lembaga kemasyarakatan yang paling tua dan kuat, sehingga kaum perempuan itu sendiri menganggap hal tersebut sebagai alamiah, bahkan menerima peran yang diberikan kepada mereka sebagai sesuatu yang mulia (Budiman, 1982).

Pembagian kerja dalam masyarakat modern lebih kompleks dan tampak nyata dibandingkan pada masyarakat tradisional yang lebih bersifat homogen. Oleh karena itu fenomena pembagian kerja dalam suatu masyarakat, menurut Durkheim (1893) dalam Johnson (1988), dapat dikaji untuk melihat perubahan sosial yang terjadi. Pembagian kerja tidak semata-mata berpengaruh kepada bidang ekonomi, tetapi juga meluas kepada bidang sosial, politik dan budaya. Contoh sederhana dapat dilihat pada kehidupan pertanian dipedesaan, yang baru mengenal alat penggilingan padi. Dahulu, bila masa panen tiba kaum wanita memegang peranan penting, karena turut menuai dengan ani-ani, merontokan butir-butir padi dari batangnya dan menumbuknya. Dengan masuknya mesin penggiling padi, kaum wanita kehilangan sebagian pekerjaannya, karena yang mendapat keterampilan menggunakan alat modern itu adalah laki-laki. Akibatnya kaum perempuan semakin "tersingkir" ke dalam sektor

domestik dan peranan wanita dalam sektor pertanian semakin menurun.

Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu: produksi, reproduksi dan komunitas, yang oleh Mosse (2007) disebut 3 (tiga) peran gender (*triple role*), yaitu:

1. Kerja produktif adalah semua pekerjaan yang berkaitan dengan produksi barang dan jasa untuk mendapatkan penghasilan dan subsistensi (pemenuhan kebutuhan dasar). Jenis pekerjaan kategori inilah yang paling utama diakui dan dianggap lebih bernilai sebagai pekerjaan baik oleh individu maupun masyarakat, secara umum yang paling banyak dimasukkan kedalam statistik ekonomi nasional.
2. Kerja reproduktif adalah pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan rumah tangga dan anggotanya, seperti: memasak, mencuci, membersihkan, merawat, menjaga dan membesarkan anak, memelihara tempat tinggal, dan seterusnya. Jenis pekerjaan ini sangat dibutuhkan dan penting sifatnya, akan tetapi sering dianggap tidak sama nilainya dengan pekerjaan produktif.
3. Kerja komunitas adalah kegiatan yang dilakukan untuk aktivitas masyarakat seperti upacara dan perayaan yang tujuannya untuk meningkatkan solidaritas masyarakat serta mempertahankan tradisi setempat, serta meningkatkan partisipasi dalam kelompok atau organisasi sosial. Tipe pekerjaan ini jarang sekali diperhitungkan dalam analisis ekonomi dan dianggap

sebagai pekerjaan sukarela dan untuk pengembangan spiritual dan kultural dari suatu komunitas.

Pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan berdasarkan gender oleh Rustiani (1996), membagi menjadi 4 yaitu:

1. Pembedaan peran dalam hal pekerjaan. Misalnya, laki-laki dianggap pekerja produktif dan perempuan pekerja reproduktif. Kerja produktif adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan uang (dibayar). Kerja reproduktif adalah kerja yang menjamin pengelolaan dan reproduksi angkatan kerja (termasuk di dalamnya adalah mengurus pekerjaan rumah tangga dan melahirkan anak). Kerja reproduktif ini biasanya tidak menghasilkan uang.
2. Pembedaan wilayah kerja. Laki-laki berada di wilayah publik (di luar rumah) dan perempuan berada di wilayah domestik (di dalam rumah/ruang pribadi)
3. Pembedaan status. Laki-laki berperan sebagai subyek, sebagai aktor utama, dan perempuan sebagai obyek atau pemain figuran (pelengkap). Karenanya, laki-laki berperan sebagai pencari nafkah utama dan perempuan pencari nafkah tambahan. Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan dipimpin.
4. Pembedaan sifat. Perempuan dilekati dengan sifat dan atribut feminim misalnya halus, sopan, kasih sayang, cengeng, penakut, emosional, "cantik", memakai perhiasan dan cocoknya berkain panjang atau rok. Sementara laki-laki dilekati sifat maskulin misalnya,

kuat, berani, keras, rasional, kasar, gagah, tegas, berotot, aktif, dan karenanya memakai pakaian yang praktis seperti celana panjang/pendek dan berambut pendek.

Pembagian kerja menurut Hasibuan (dalam Roring, 2017: 146) pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi atau perusahaan.

Di dalam perkembangan saat ini, pembagian kerja tidak hanya berhenti pada pembagian jenis kerja, melainkan juga pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin. Ensiklopedia ilmu sosial memberikan gambaran mengenai pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin (*division of labour by sex*) sebagai berikut: Pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu elemen struktural dasar dalam organisasi sosial. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah asal mula pola pembagian kerja manusia serta konsekuensinya terhadap hubungan antar jenis kelamin. Pandangan umum yang diyakini adalah pola pembagian tersebut diawali oleh fakta bahwa perekonomian subsistem primitif bertumpu pada laki-laki sebagai pencari makan, baik itu dari perburuan, perikanan/pemeliharaan ternak secara kecil-kecilan. Marx dan Engels (1947/1932) berpendapat bahwa superioritas perekonomian maskulin merupakan hukum alam dan potensi perbudakan terhadap jenis kelamin tertentu dalam keluarga adalah konsekuensi yang wajar. Engels mengatakan bahwa pola pembagian

kerja berdasarkan jenis kelamin itu cenderung konstan dari waktu ke waktu.

Pembagian kerja ada kalanya memang tidak seimbang, namun keseimbangan itu bukan berarti harus sama dalam satu atau jenis pekerjaan. Hal ini dikembalikan pada kemampuan seseorang dalam bidang-bidang tertentu.

Pembagian kerja seksual merupakan pembagian kerja yang didasarkan atas jenis kelamin. Di kalangan masyarakat terdapat pembagian kerja seksual di mana beberapa tugas dilaksanakan oleh perempuan dan beberapa tugas lain semata-mata dilakukan oleh laki-laki. Kesadaran akan perbedaan pendefinisian maskulinitas dan feminitas di setiap masyarakat ini membawa kesadaran akan adanya bentuk-bentuk pembagian kerja secara seksual yang berbeda. Tetapi dalam perkembangannya, masyarakat kita tidak bisa menghindari telah terjadinya pergeseran peran dimana sebagian perempuan juga aktif di aktivitas kerja (publik) ataupun aktivitas sosial yang lain. Bahkan saat ini fenomena perempuan yang bekerja maupun berkarir menjadi bagian dari perkembangan kemajuan perempuan untuk mencapai posisi kesetaraan dan kemajuan relasi sosial yang setara antara perempuan dan laki-laki seperti yang terjadi di Wisata Agro Wonosari dalam pengelolaannya terdiri dari tiga bidang yang di koordinasi dua perempuan dan satu laki-laki (Saptari & Holzner, 1997).

Adanya kesadaran bahwa perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki mendorong dikembangkannya konsep emansipasi antara perempuan dan laki-laki. Kesadaran ini kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai

konvensi, resolusi maupun penyusunan rencana aksi yang berupa perubahan untuk meningkatkan kondisi, situasi dan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan. Seiring dengan perkembangan upaya memperbaiki tersebut, terjadi pula pergeseran strategi (yang meliputi *Women In Development*, *Women And Development*, *Gender And Development* dan kemudian dimatangkan oleh *gender mainstreaming*) (Arum, 2012: 16).

Women in development (WID-perempuan dalam pembangunan) menjadi bagian diskursus pembangunan, dan merupakan pendekatan dominan bagi pemecahan persoalan perempuan pada dunia ketiga. Gagasan *women in development* dianggap satu-satunya jalan guna memperbaiki status dan nasib berjuta-juta perempuan di Negara dunia ketiga.

Agenda utama program *women in development* adalah bagaimana melibatkan kaum perempuan dalam kegiatan pembangunan. Asumsinya, penyebab keterbelakangan perempuan adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam pembangunan. Namun setelah kurang lebih sepuluh tahun berjalan banyak orang mulai menyangsikannya dan mengajukan kritik yaitu *women and development* (Fakih, 2001: 58).

Kebiasaan rutin perempuan seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak dan sebagainya yang lazim disebut peran domestik, sering diartikan sebagai tugas yang sudah dikodratkan (ditentukan Tuhan). Kesalah pahaman ini telah mengakar pada budaya masyarakat, padahal sesungguhnya, jender pada dasarnya merupakan

konstruksi sosial bukan Kodrat yang berarti ketentuan Tuhan Ironisnya pemahaman tersebut juga dikonstruksikan oleh tokoh-tokoh agama, sadar atau tidak dengan justifikasi dalil-dalil Al-Qur'an dan Al- Hadits.

Perbedaan jenis seksual dan orientasi seksual melahirkan pola Sosial dalam kehidupan masyarakat yang membedakan kategoris Sosial. Pola perbedaan yang dijalankan diruang domestik yaitu rumah tangga, keluarga inti (*Family*) maupun kekerabatan (*Extended Family*) melahirkan konsep dalam sistem kekerabatan yang berfungsi untuk mengatur kepastian garis geneologis. Maka di kenal dengan sistem kekerabatan *Patriarkhat/ Patrilineal* (atas dasar garis Ayah/Laki-laki) dan *Matriarkhat/ Matrilineal* (garis Ibu/Perempuan). Sepanjang menjadi pengatur di ruang domestik, batas kekuasaan yang dijalankan sepenuhnya atas hubungan geneologis. Pola kategoris Sosial ini menjadi penting karena memiliki dimensi kultural sebagai sumber simbol-simbol kultur yang bersifat etis dan entetis.

Dalam keluarga yang berpenghasilan rendah (Keluarga kelas bawah). Peran Perempuan bukan hanya meliputi peran domestik namun juga peran publik untuk membantu mencukupi penghasilan keluarga. Memang, bagi kebanyakan keluarga kelas bawah keterlibatan seluruh anggota keluarga merupakan tuntutan.. Kemeskinan telah menjadi penghambat, bukan saja bagi Perempuan tapi juga Laki- laki.

Fenomena sosial tersebut sebenarnya tidak perlu di perdebatkan jika tidak menimbulkan masalah, namun

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang mungkin timbul karena peran ganda Perempuan itu, berupa konflik batin, konflik suami dan istri bahkan konflik antara keluarga suami dengan keluarga istri. Hal ini karena di suatu pihak istri ikut dalam peran publik dan dipihak lain, suami tidak mau membantu dalam peran domestik yang akhirnya menjadi peran dan beban ganda Perempuan yang sering disebut dengan Double Burden.

Tugas ini adalah tugas yang diberikan alam kepada mereka : melahirkan dan membesarkan anak-anak di dalam lingkungan rumah tangga, serta memasak dan memberi perhatian kepada suaminya, supaya sebuah rumah tangga yang tentram dan sejahterah dapat diciptakan. Laki-laki punya tugas lain, yakni pergi keluar rumah untuk mencari makan untuk keluarganya, baik berburu (jaman dulu) atau bekerja untuk mendapatkan gaji (jaman sekarang). Inilah pembagian kerja yang didasarkan atas perbedaan Seks, yang diatur oleh alam untuk menciptakan kehidupan masyarakat manusia yang beradab. Pembagian kerja secara seksual ini berlangsung ribuan tahun. Karena itu orang cenderung mengaggapnya sebagai sesuatu yang alamiah.

Perdebatan tentang perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya berputar di sekitar dua teori besar yakni : Teori *Nature* dan *Nurture*. pengikut teori *Nature* beranggapan bahwa perbedaan psikologis antara laki-laki dan perempuan di sebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini. Pengikut teori *Nurture* beranggapan bahwa perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan. Diantara teori yang ekstrim ini,

tentu saja ada teori-teori yang mencoba menjelaskan bahwa perbedaan ini di sebabkan oleh semacam interaksi antara faktor- faktor biologis dan faktor-faktor sosio-kultural.

Pandangan yang miring terhadap kodrat perempuan seringkali dihubungkan dengan norma Agama. Agama dipandang telah memapankan “ketimpangan” peran berdasarkan perbedaan jenis kelamin sebagaimana dalam lintasan sejarah umat manusia, bahkan dianggap sebagai asal-usul ketimpangan tersebut. Norma kultural semula lebih banyak mendukung konsep Agama mengenai peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Tetapi pada dekade terakhir, norma kultural cenderung tidak terikat oleh doktrin Agama.

BAB IV

PERAN PEREMPUAN DALAM PEKERJAAN PRODUKTIF DAN REPRODUKTIF

Perempuan memiliki peran yang kompleks dalam kehidupan, yaitu peran kerja dalam reproduksi, seperti melahirkan dan mengasuh anak, dan juga memiliki peran kerja ekonomi produktif dalam menopang ekonomi keluarga serta manajemen komunitas (Mosse, 2007) dan Mosse (2007), menyebutnya sebagai tiga serangkai peran perempuan. Ini menunjukkan, perempuan memiliki peran ganda, yaitu: disamping harus melakukan pekerjaan rumah tangga atau domestik, juga memiliki peran pencari nafkah untuk meraih kesejahteraan.

Kerja produktif adalah suatu proses kerja yang menghasilkan sesuatu, dalam masyarakat kapitalis biasanya sesuatu yang dihasilkan itu diartikan dengan nilai tukar. Konsep kerja produktif ini seringkali diasosiasikan sebagai pekerjaan publik (sektor umum). Oleh karena itu kerja-kerja domestik yang dilakukan perempuan, misalnya memasak (yang juga menghasilkan sesuatu untuk dikonsumsi keluarga) seringkali dianggap bukan sebagai kerja produksi (Rustiani, 1996).

Peran reproduktif dikonstruksikan secara sosial budaya sebagai tugas dan tanggungjawab perempuan. Dimanapun perempuan berada, tugas dan tanggungjawab itu tidak boleh ditinggalkan, sehingga tidak jarang perempuan

merasa bersalah ketika dia harus melakukan pekerjaan di luar rumah dan harus meninggalkan anak-anak dan suami dirumah. Peran produktif didefinisikan sebagai tugas atau aktivitas yang menghasilkan income (pendapatan). Sedangkan peran kemasyarakatan, didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan pada tingkat masyarakat. Contohnya perempuan melakukan pelayanan pos yandu (Rustiani, 1996).

Menurut Rustiani (1996), konsep kerja reproduksi memiliki tingkat abstraksi teoritis yang berbeda-beda, yaitu reproduksi sosial, reproduksi biologis dan reproduksi tenaga kerja. Reproduksi sosial berkaitan dengan upaya-upaya mempertahankan suatu sistem sosial, dalam hal ini, pokok dasarnya adalah merinci struktur apa saja yang harus direproduksi agar reproduksi sosial dapat berlangsung secara utuh. Reproduksi biologis artinya perkembangan fisik umat manusia atau mengembangbiakan umat manusia. Sementara yang dimaksud reproduksi tenaga kerja adalah perawatan sehari-hari tenaga kerja dan calon tenaga kerja, dan alokasi pelaku-pelaku dalam berbagai posisi di dalam proses pekerjaan. Reproduksi tenaga kerja komponen dasarnya berasal dari reproduksi biologis. Kedua konsep reproduksi ini sering diasosiasikan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.

Tugas-tugas domestik (di dalam rumah) seperti mengasuh dan mendidik anak, memasak, membersihkan dan merawat rumah dan lain-lain selama ini dianggap merupakan tugas perempuan, bahkan dianggap sebagai kodrat. Sementara itu laki-laki diberi peran menjalankan

tugas-tugas di ruang publik, mencari nafkah dan menjadi kepala rumah tangga.

Menurut Fakih (2004), garis antara kerja reproduktif dan produktif adalah sebuah garis yang bagus, dan bila tidak memahami aktivitas gender yang kompleks dan "banyak segi", tidak dapat menghargai bagaimana kegiatan itu dipengaruhi oleh dan mempengaruhi proses pembangunan. Kegagalan mengenali dan menghargai kerja produktif perempuan di dalam rumah tangga menghalangi pengakuan penuh atas kerja perempuan yang lainnya.

Pujiwati (1987), mengembangkan konsepsi "bekerja" menjadi suatu batasan yang meliputi lima pengertian, yaitu:

1. Para pelaku mengeluarkan energi
2. Para pelaku terjalin dalam interaksi sosial serta mendapat status
3. Para pelaku memberikan sumbangan dalam produksi barang maupun jasa
4. Para pelaku mendapatkan penghasilan (cash atau natura)
5. Para pelaku mendapatkan hasil yang mempunyai nilai waktu

Hasil dari Internasional Symposium on Women in Asian Fisheries (1988) di Chiang mai Cina dan dalam Global Symposium on Women in Fisheries (2001) di Kaohsiung Taiwan disebutkan beberapa hasil penelitian tentang kerja perempuan (istri atau anak perempuan) dari rumahtangga

perikanan dan pertanian di Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dalam Williams, *et al.*,(2002), yaitu:

1. Mempunyai beban kerja berlebih dengan kontribusi yang tidak diakui, tidak dinilai maupun dinilai rendah
2. Mengalami eksploitasi dalam pekerjaan dan diupah secara rendah
3. Buta huruf, kurang makan, sakit-sakitan dan mempunyai produktivitas rendah

Sedikit sekali kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya dan terbatas aksesnya untuk mendapatkan pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemandirian.

Partisipasi wanita di dunia kerja telah memberikan kontribusi besar terhadap kesejahteraan keluarga khususnya di bidang ekonomi. Kehadiran wanita bekerja besar manfaatnya dan perlu. Sebagai patner kaum pria, tidak hanya di rumah tapi juga dalam bekerja dengan menyalurkan bakatbakat mereka. Peningkatan partisipasi kerja tersebut bukan hanya mempengaruhi kesejahteraan pasar kerja, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan wanita itu sendiri dan kesejahteraan keluarga. Wanita yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga secara otomatis, meningkatkan kualitas gizi, kesehatan dan perekonomian keluarga.

Bekerja yaitu melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperoleh penghasilan berupa uang atau barang, dengan kurun waktu tertentu. Wanita bekerja adalah

wanita yang memiliki aktivitas di luar kodratnya sebagai wanita, ibu rumah tangga atau lajang. Di luar rumah mereka menghabiskan waktu melakukan aktivitas lebih besar daripada waktu mereka di rumah. Menurut Kardamo wanita di tempat kerja adalah wanita yang bekerja mengandalkan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa wanita bekerja adalah wanita yang bekerja secara berkesinambungan dengan profesi dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan hasil karyanya.

Persepsi arti penting peran pekerjaan dan keluarga dari pentingnya pekerjaan, orang tua, dan pasangan diukur oleh komitmen pekerjaan, komitmen orang tua, komitmen pasangan, nilai pekerjaan, nilai orang tua, dan nilai pasangan. Tiga kelompok muncul dari persepsi ini yaitu Profil A (mengutamakan keluarga), Profil B (mengutamakan pekerjaan), dan Profil C (keluarga dan pekerjaan sama penting). Komitmen dan nilai-nilai wanita mengenai orang tua dan peran pasangan akan lebih tinggi dibanding pria. Begitu juga sebaliknya nilai-nilai dan kesanggupan untuk peran pekerjaan akan lebih tinggi dibandingkan dengan wanita.

Nilai yang ada dalam masyarakat Indonesia dewasa ini berbaur antara nilai-nilai tradisional dan modern. Dalam peran pekerjaan dan keluarga, pria biasanya sebagai "peran penyedia" dan wanita lebih ke peran keluarga. Saat ini banyak wanita berperan ganda, peran ganda wanita yang ideal menuntut tugas seorang ibu rumah tangga (orang tua) sekaligus wanita karir. Keseimbangan ini harus

diakui merupakan kendala utama bagi wanita bekerja. Banyak alasan wanita bekerja, selain karena tuntutan akan kebutuhan kehidupan juga karena peningkatan taraf pendidikan kaum wanita. Peranan keluarga dalam hal ini memegang peranan sangat penting. Bagi seorang wanita dukungan pasangan dan anak-anak berpengaruh bagi karirnya.

Menurut Beneria, wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya (dalam Rini, 2002). Wanita dapat dikategorikan kedalam dua peran, yaitu peran reproduktif dan peran produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi biologis (pelahiran) sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (*economically actives*).

wanita karir adalah wanita yang memperoleh/mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan. Anoraga menyebutkan wanita yang bekerja untuk menggantikan istilah wanita karir. Beliau juga menegaskan kembali bahwa yang dimaksud dengan karir adalah bekerja apa saja asal mendatangkan suatu kemajuan dalam kehidupannya.

Jenis pekerjaan atau tugas juga berkaitan dengan timbulnya ketakutan akan sukses. Marshall (dalam Suryaningsih, 1995) bahwa ketakutan akan sukses pada wanita berhubungan dengan tugas-tugas bersifat maskulin karena individu harus bersaing dengan pria.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan wanita

mengalami ketakutan akan sukses, yaitu latar belakang soial budaya, orientasi peran jenis, situasi persaingan kerja, konflik peran ganda, dukungan sosial, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Dan pada penelitian ini, peneliti akan berfokus kepada faktor ke empat yaitu, konflik peran ganda.

Dunia industri indonesia mulai untuk mengutamakan kesetaraan gender antara kedudukan pekerja laki-laki dan perempuan. Sebab, kini peran perempuan semakin profesional dalam berkarya dan berkontribusi dalam lingkungan kerja. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pekerja perempuan meningkat sebesar 2,33 persen menjadi 55,04 persen dari sebelumnya yaitu, 52,71 persen pada Februari 2016.

Peran ganda dalam kehidupan wanita modern dengan segala aktivitasnya yang padat harus disiasati dengan pandai mengatur waktu untuk pekerjaan dan keluarga. Peran tersebut antara lain sebagai wanita bekerja, guru untuk mendidik anak, pengatur rumah tangga, peran sosialisasi sebagai anggota masyarakat. Semua yang dilakukan merupakan profesionalisme. Wanita harus mengupayakan yang terbaik untuk mencapai hasil terbaik. Seorang wanita dituntut untuk bertanggungjawab dengan pekerjaan serta profesional ditempatnya bekerja, namun tetap pada kodratnya menjadi istri yang baik, serta ibu yang dapat mengayomi keluarganya. Peran wanita sebagai seorang ibu, sangat menentukan perkembangan potensi anak (Sianturi, dalam Putrianti 2007).

Pada wanita bekerja, burnout merupakan bagian dari kehidupannya. Hal ini karena adanya peran ganda pada wanita bekerja yang menuntut wanita bekerja untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan. Work-life balance sangat penting bagi wanita bekerja, karena tuntutan tanggungjawab untuk menjadi ibu rumah tangga saat dirumah serta tuntutan pekerjaan ditempat kerja yang mengharuskannya menjalankan kedua peran tersebut dengan baik. Jika peran ganda yang dijalankan oleh wanita bekerja mampu dijalankan dengan baik, maka akan memberikan kontribusi besar serta kesejahteraan bagi dirinya dan keluarga, yang mana akan meningkatkan taraf hidup keluarga jika kehidupan serta pekerjaannya berjalan seimbang, tetapi apabila peran ganda tidak mampu dijalankan dengan baik, maka akan menimbulkan konflik peran antara keseimbangan kehidupan dengan pekerjaan yang mana akan memicu terjadinya burnout pada wanita bekerja.

Pada sebuah keluarga individu memiliki peran masing-masing sesuai dengan hak dan kewajibannya, termasuk dalam hal pekerjaan di sektor domestik maupun publik. Goode menjelaskan bahwa kesetaraan pekerjaan dan kewajiban pada suami dan istri dalam sebuah keluarga sudah jelas. Seorang istri memiliki tanggung jawab pada sektor domestik seperti mengasuh dan mendidik anak, menanamkan ikatan badaniah dan rohaniyah, melayani suami, mengurus segala macam urusan rumah tangga, memberikan kasih sayang, menghibur, merawat,

memberikan ketenangan dan kedamaian pada anggota keluarga yang berselisih (Goode, 1983 : 14).

Stevin Tumbage,dkk (2017 : 2) menjelaskan bahwa peran seorang ibu lebih dominan di dalam rumah tangga, seorang ibu tidak hanya berkaitan dengan memasak, mengasuh anak, melayani suami, berbelanja, mencuci, melayani suami, namun banyak sekali kegiatan yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga baik menjadi seorang ibu bagi anaknya dan menjadi seorang istri bagi suaminya. Hal ini sangat jelas sekali bahwa perempuan memiliki peran yang lebih banyak dalam sebuah keluarga dibandingkan dengan laki-laki. Tugas antara suami dan istri juga dijelaskan dalam undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 31 yang mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, namun ayat sebelumnya dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam urusan rumah tangga.

Goode juga menjelaskan bahwa seorang suami atau ayah berperan sebagai pemimpin dan mengatur pembagian tugas dalam keluarga, kemudian juga memiliki peran untuk melindungi keluarga dari pertentangan politik atau perang. Seorang ayah harus mampu memecahkan permasalahan yang ada di lingkungan luar yang terkait dengan jasmaniah maupun sosial. Peran ibu dan ayah dalam sebuah keluarga haruslah berfungsi sebagaimana mestinya, Goode menjelaskan bahwa seorang ibu yang lemah atau tidak berfungsi dalam keluarga atau ayah yang bersifat kejam atau sebaliknya memungkinkan terjadi

sebuah kegagalan dalam pemasyrakatan (Goode, 1983 : 14-15).

Akibat dari tuntutan tugas yang disebutkan di atas menyebabkan wanita pekerja tidak mampu melakukan beberapa hal terkait dengan urusan rumah tangga seperti, ia tidak bisa selalu ada bagi keluarganya karena harus menyelesaikan tugasnya bekerja di sektor publik. Tidak bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya karena kesibukan yang dijalani. Tugas seorang ibu seperti merawat anak, mendidik, dan mengawasi tidak bisa dilakukan sepenuhnya karena tanggung jawab pada karir. Intensitas juga menjadi berkurang karena rasa lelah setelah bekerja, sehingga dapat dikatakan bahwa perempuan yang megembangkan karir berarti fungsifungsi kerumahtanggaan yang harus dijalani menjadi vakum atau terhenti.

Peranan menurut Levinson dalam Soerjono Soekanto (1990) mencakup tiga hal yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Ashar Sunyoto Munandar (Sc Utami Munandar, 1985), peran wanita dapat dikelompokkan dalam beberapa tipe yaitu:

1. Wanita yang melayani

Kegiatannya berpusat pada kegiatan melayani dalam arti yang luas, termasuk disini mendidik, merawat, mengatur dan mengurus untuk dinikmati oleh orang lain atau untuk dinikmati bersama-sama. Wanita dalam hal ini menjadi sumber yang dapat membahagiakan orang lain.

2. Wanita yang bekerja

Dalam peran ini, selain kegiatan melayani wanita juga bekerja atau melakukan kegiatan yang memberikan penghasilan. Sebagai istri, wanita melayani ditambah dengan ikut mencari penghasilan untuk menunjang keperluan keluarga. Dibanding wanita yang melayani, wanita bekerja memiliki kesibukan yang lebih banyak.

3. Wanita yang mandiri

Tipe wanita ini menekankan pada kemandiriannya sebagai wanita yang bekerja, melakukan pekerjaan yang menghasilkan uang yang dapat ia putuskan sendiri penggunaannya. Sebagai istri, wanita ini tidak "memonopoli" pendidikan dan perawatan anak. Perawatan dan pendidikan anak serta pengaturan rumah tangga diatur bersama suami dengan kesepakatan bersama. Ia melayani suami sebagaimana ia harapkan suami melayaninya. Suami istri merupakan partner yang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.

Peran sosial dalam konteks keberadaan wanita sesuai dengan teori di atas adalah berkaitan dengan fungsi status atau kedudukan yang dimilikinya baik didalam keluarga atau lingkungan domestik serta dalam pekerjaannya atau lingkungan publik yang digelutinya. Harus diakui, bahwa pada dasarnya setiap individu akan menyanggah berbagai peran sosial. Ini sama dengan yang terjadi dengan kaum wanita yang harus menjalankan berbagai peran tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan yaitu sebagai seorang istri bagi suami yang harus mampu menjadi penyeimbang, kawan ataupun mitra dan partner, sebagai seorang ibu yang harus mampu menjalankan fungsi afeksi atau kasih sayang sekaligus perhatian bagi anak-anaknya, sebagai ibu rumah tangga yang harus menjalankan aktivitas keseharian yang berkaitan dengan kelangsungan hidup rumah tangganya sekaligus sebagai seorang pekerja apabila dia memiliki aktivitas lain diluar rumah (publik) yang harus menjalankan tanggung jawab suatu pekerjaan yang dibebankan padanya dan mungkin juga berkaitan dengan peran sosial yang berkaitan dengan upaya pemuasan kebutuhan akan ruang-ruang pribadi didalam dirinya.

Peran gender menampilkan kesepakatan pandangan dalam masyarakat dan budaya tertentu perihal ketepatan dan kelaziman bertindak untuk seks tertentu (jenis kelamin tertentu) dan masyarakat tertentu. Peran gender berbeda antar masyarakat atau bahkan antar kelompok didalam masyarakat tertentu dan sering mengalami perubahan.

Cth: Single Parent (ibu sebagai Kepala Rumah Tangga), Istri bekerja vs Suami mengurus rumah.

Dualisme karir terjadi bila suami maupun istri sama-sama bekerja dan mengurus rumah tangga secara bersama pula. Didalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami-istri memiliki cara yang berbeda di dalam mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Wanita yang bekerja secara part timer umumnya menganggap bahwa pekerjaan hanyalah sekedar hobby dan hanya menduduki prioritas kedua dibawah kepentingan keluarga. Tetapi dalam keluarga dualisme karir egalitarian, suami istri bekerja tidak hanya sekedar mencari nafkah tetapi juga dalam persaingan untuk mendapatkan posisi yang sama dalam pengambilan keputusan serta berbagai aktivitas dalam keluarga.

Sedangkan menurut Astuti, dalam peran dan kebutuhan gender peran perempuan terdiri atas.

1. Peran Produktif

Peran produktif pada dasarnya hampir sama dengan peran transisi, yaitu peran dari seorang perempuan yang memiliki peran tambahan sebagai pencari nafkah tambahan bagi keluarganya. Peran produktif adalah peran yang di hargai dengan uang atau barang yang menghasilkan uang atau jasa yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Peran ini diidentikkan sebagai peran perempuan di sektor publik, contoh petani, penjahit, buruh, guru, pengusaha.

2. Peran Reproduksi

Pada dasarnya hampir sama dengan peran tradisional, hanya saja peran ini lebih menitikberatkan pada kodrat perempuan secara biologis tidak dapat dihargai dengan nilai uang/barang. Peran ini terkait dengan kelangsungan hidup manusia, contoh peran ibu pada saat mengandung, melahirkan dan menyusui anak adalah kodrat dari seorang ibu. Peran ini pada akhirnya diikuti dengan mengerjakan kewajiban mengerjakan pekerjaan rumah.

3. Peran Sosial

Peran sosial pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan dari para ibu rumah tangga untuk mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat. Peran ini lebih mengarah pada proses sosialisasi dari pada ibu rumah tangga.

Jika merujuk pada konsep "*Triple Roles*" yang dikembangkan Caroline Moser ketika menganalisis beban kerja perempuan di dunia ke tiga. Perempuan dalam kehidupan kesehariannya mengerjakan kegiatan reproduktif, produktif dan pengelolaan komunitas secara bersamaan.

1. Kegiatan Reproduksi atau biasa dikenal dengan tugas domestik antara lain menyangkut pemeliharaan dan perawatan rumah tangga, seperti memelihara dan membesarkan anak, menyediakan makanan, menyediakan air dan bahan bakar, berbelanja, pemeliharaan rumah dan pelayanan kesehatan keluarga.

2. Kegiatan produktif dimaknai sebagai kegiatan yang untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperdagangkan. Seperti pertanian, nelayan dan wiraswasta.
3. Sedangkan pengelolaan Komunitas dimaksudkan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian dan pelayanan sosial yang ada di dalam komunitas, seperti acara peringatan, selamatan, kerja bakti, partisipasi dalam kegiatan kelompok masyarakat dan kegiatan politik lokal.

Dalam keluarga, perempuan sebagai ibu dituntut pada tugas-tuga domestiknya yang tidak dapat dihindari, namun sebagai perempuan, harus dapat melaksanakan tugas pelaksana emansipasi perempuan. Sebagai perempuan harus melaksanakan beberapa peran untuk dapat mengikuti perkembangan dan tuntutan kemajuan.

BAB V

PERAN PEREMPUAN DALAM KEGIATAN SOSIAL BUDAYA/KEMASYARAKAT

Menurut Suryakusuma (2011), pada masa Orde Baru (Orba), Negara Republik Indonesia memiliki kontrol yang sangat besar pada warganya, terutama perempuan. Negara menciptakan ideologi gender yang ditujukan sebagai dasar untuk mengatur sosok perempuan ideal yang dibutuhkan oleh Negara yaitu "ibu" dan "istri". Ideologi yang populer disebut sebagai "Ibuisme Negara" ini dikampanyekan secara intensif oleh dan bahkan diwujudkan secara nyata oleh Negara melalui pembentukan-pembantuan organisasi-organisasi yang menjadi wadah untuk mendidik perempuan menjadi ibu dan istri sesuai harapan Negara, misalnya PKK, Dharma Wanita, Persit Kartika Chandra Kirana, Bhayangkari, dan lain-lain.

Di Indonesia, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan kegiatan kemasyarakatan paling populer, sampai ke pelosok pedesaan. PKK adalah organisasi perempuan bentukan pemerintahan Orde Baru (Orba), pada masa Orba organisasi ini bersifat semi-formal dan wajib diikuti oleh semua perempuan sehingga anggotanya banyak dan tersebar di seluruh penjuru tanah air. Tetapi setelah Orba runtuh, organisasi ini tidak ikut bubar, hanya saja keikutsertaan perempuan dalam organisasi tersebut tidak lagi bersifat wajib, namun sampai saat ini, PKK tetap

menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia (Rahayu, 2015).

Ide dasar PKK yang semula bertujuan memberdayakan perempuan dalam bidang ekonomi mengalami perubahan menjadi organisasi korporatis Negara untuk mawadahi, menggerakkan dan mengontrol kegiatan perempuan yang bukan istri ABRI dan Pegawai Negeri. Hal ini terlihat jelas dengan perubahan kata "Pendidikan" dalam singkatan PKK menjadi "Pembinaan" pada tahun 1984. PKK juga menjadi alat Negara untuk melaksanakan program "Keluarga Berencana" melalui BKKBN, dengan cara menjadi tenaga sukarela untuk merekrut calon-calon peserta KB dan mengajarkannya ke pusat-pusat layanan KB, peran lainnya adalah menjadi kader PKK dalam kegiatan Posyandu (Rahayu, 2005).

Di era pasca reformasi perempuan memiliki keleluasaan dalam memilih kegiatan di masyarakat dan cenderung berpartisipasi dalam beberapa kegiatan sekaligus. Partisipasi tersebut, bukan sekedar untuk menyalurkan aspirasi saja, tetapi alat untuk aktualisasi diri bagi perempuan dalam membangun identitas sosial baru yang lebih jamak, bukan sekedar sebagai ibu dan istri saja, tetapi sebagai aktivitas sosial dan warga masyarakat (Herawati, 2016).

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa tempat perempuan di rumah. Perempuan bukanlah pencari nafkah karena yang mencari nafkah adalah laki-laki atau suami. Walaupun perempuan bekerja dan memperoleh penghasilan yang memadai, ia tetap berstatus "membantu

suami". Ketika banyak perempuan bekerja di sektor modern, hal tersebut dipermasalahkan. Ada kekhawatiran bahwa bila perempuan aktif di luar rumah tangga, anak-anak akan terabaikan dan rumah tangga menjadi tidak terurus.

Penyebab timbulnya peran domestik bagi perempuan tentu tidak lepas dari beberapa hal, diantaranya ialah faktor bawaan fisik, hanya perempuan yang oleh Allah dibekali pengalaman dan perlengkapan komplit untuk proses pengasuhan anak. Mulai dari menstruasi masa kehamilan dan menyusui. Tentu saja hal-hal tersebut merupakan kodrat alamiah yang tidak bisa ditukar dengan laki-laki. Walaupun sudah menjadi kodrat namun ada saja usaha-usaha para feminis penuntut kesetaraan gender 50/50, sehingga sering kali menuduh bahwa keluarga adalah penghambat tuntutan tersebut.

Diantara penuntut dihilangkannya peran domestik perempuan adalah para feminis-liberal. Mereka menganggap bahwa institusi keluarga, posisi sebagai istri tak ubahnya hidup dalam penjara tirani, dibawah kekuasaan seorang tiran, yaitu suami. Untuk itu mereka banyak menuntut revisi terhadap undang – undang perkawinan, untuk melindungi hak – hak wanita terhadap kepemilikan properti, juga untuk pembagian tugas antara suami dan istri.

Tuntutan lain disuarakan oleh feminis-sosialis, yang menghendaki agar segala tugas pengasuhan anak diselenggarakan oleh negara. Maka mereka menuntut negara untuk menyediakan berbagai failitas seperti makan pagi dan siang untuk anak sekolah, menyediakan day-

care centre, menyediakan dapur umum, menyediakan ruang makan umum, tempat mencuci umum, dan juga asrama untuk anak-anak agar urusan anak tidak lagi menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya perempuan. Tujuannya agar para perempuan bisa bekerja setara dengan laki-laki.

Kesetaraan sosial antara laki-laki dan perempuan adalah bagaimana membangun paradigma agar laki-laki dan perempuan memiliki kesederajatan, sehingga tidak ada rasa superioritas. Pada beberapa konteks, perempuan harus dilindungi, dan konteks yang dimaksud adalah konteks sosial budaya karena yang menyebabkan perempuan berada di bawah laki-laki adalah karena struktur sosial dan pusanan budaya yang terkadang membawa nilai dan pola tingkah laku yang tidak bagus bagi proses perubahan sosial (Azis,2007:65).

Marginalisasi perempuan yang muncul kemudian menunjukkan bahwa perempuan menjadi the second sex, seperti juga sering disebut sebagai "warga kelas dua" yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Pembahasan tentang perempuan sebagai suatu kelompok memunculkan sejumlah kesulitan. Konsep "Posisi perempuan" dalam masyarakat memberi kesan bahwa, ada beberapa posisi universal yang diduduki oleh setiap perempuan di semua masyarakat. Kenyataannya bahwa, bukan semata-mata tidak ada pernyataan yang sederhana tentang "Posisi perempuan" yang universal, tetapi disebagian besar masyarakat tidaklah mungkin memperbincangkan perempuan sebagai kelompok yang

memiliki kepentingan bersama. Perempuan ikut andil dalam stratifikasi masyarakat. Ada perempuan kaya, ada perempuan miskin, dan latar belakang kelas kaum perempuan mungkin sama penting dengan jendernya dalam menentukan posisi mereka di masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, latar belakang etnis seorang perempuan, bahkan mungkin lebih penting daripada kelas. Istilah Gender juga berguna, karena istilah itu mencakup peran sosial kaum perempuan maupun laki-laki. Hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali amat penting dalam menentukan posisi keduanya. Demikian pula, jenis-jenis hubungan yang dapat berlangsung antara perempuan dan laki-laki akan merupakan konsekuensi dan pendefinisian perilaku gender yang semestinya dilakukan oleh masyarakat.

Struktur sosial masyarakat yang membagi-bagi antara laki-laki dan perempuan seringkali merugikan perempuan. Perempuan diharapkan dapat mengurus dan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, walaupun mereka bekerja di luar rumah tangga, sebaliknya tanggung jawab laki-laki dalam mengurus rumah tangga sangat kecil. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa, tugas-tugas kerumahtanggaan dan pengasuhan anak adalah tugas perempuan, walaupun perempuan tersebut bekerja. Ada batasan tentang hal yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga. Perempuan kurang dapat mengembangkan diri, karena adanya pembagian tugas tersebut. Peran ganda laki-laki kurang dapat diharapkan

karena adanya ideologi tentang pembagian tugas secara seksual. Dalam setiap masyarakat, peran laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan. Perbedaan yang dilakukan mereka berdasar komunitasnya, status maupun kekuasaan mereka. Perbedaan perkembangan peran gender dalam masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari lingkungan alam, hingga cerita dan mitos-mitos yang digunakan untuk memecahkan teka-teki perbedaan jenis kelamin (Mosse 1996:5).

Dalam masyarakat terdapat bermacam-macam kerja yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Pembagian kerja tersebut berdasarkan jender (gender division of labour). Misalnya, di dalam masyarakat primitif, menurut antropolog Ernestine Friedl, seperti yang dikutip Budiman, bahwa perempuan lebih penting dari laki-laki. Pada masyarakat primitif, ketika manusia masih hidup mengembara dalam kelompok kecil, bahaya yang paling ditakuti adalah musnahnya kelompok, yang disebabkan matinya anggota kelompok. Karena itu, jumlahnya harus diperbesar dengan cara memperbanyak lahirnya bayi-bayi, tetapi jumlah anak yang lahir masih terbatas. Untuk itu laki-laki banyak dikorbankan, dengan pergi ke medan perang dan berburu, yang mana pekerjaan tersebut dapat membahayakan nyawa, maka muncullah pembagian kerja berdasarkan seks. Perempuan bekerja di dalam rumah, laki-laki bekerja di luar. (Budiman,1991). Sejalan dengan pendapat tersebut Ihromi juga mengatakan bahwa, "Satu hal yang juga perlu diingat, bahwa adanya anggapan bahwa laki-laki adalah selalu pencari nafkah utama,

sementara perempuan bertanggung jawab hanya atas segala pekerjaan reproduktif maupun pekerjaan domestik yang terkait dalam organisasi rumah tangga”.

Secara fisik, perempuan berbeda dengan laki-laki. Bukan hanya itu perbedaan antara perempuan dan laki-laki juga secara psikologis, laki-laki lebih rasional, lebih aktif, lebih agresif. Perempuan sebaliknya: lebih emosional, lebih pasif, lebih submitif. Karena itu banyak orang percaya bahwa perempuan sudah sewajarnya hidup di lingkungan rumah tangga. Tugas ini adalah tugas yang diberikan alam kepada mereka: melahirkan dan membesarkan anak-anak di dalam lingkungan rumah tangga, serta memasak dan memberi perhatian kepada suaminya supaya sebuah rumah tangga yang tenteram dan sejahtera dapat tercipta. Laki—laki punya tugas lain, yakni pergi keluar rumah untuk mencari makan untuk keluarganya, baik berburu (jaman dulu) atau bekerja mendapatkan gaji (jaman sekarang). Inilah pembagian kerja yang di dasarkan atas perbedaan seks, yang di atur oleh alam (demikian kata orang) untuk menciptakan kehidupan masyarakat manusia yang beradab. Pembagian kerja secara seksual ini sudah berlangsung ribuan tahun, karena itu orang cenderung menganggap sebagai sesuatu yang alamiah (Budiman 1991:1). Sedangkan, menurut Talcot Parsons, dengan peraturan yang jelas bahwa perempuan harus bekerja di dalam rumah tangga, maka ditiadakan kemungkinan terjadinya persaingan antara suami dan isteri., dengan pembagian kerja secara seksual ini, jelas bahwa sang suami

mengembangkan karirnya di luar rumah, sang isteri di dalam rumah.

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk mejadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan, bias gender yang mengakibatkan beban kerja tersebut seringkali diperkuat dan disebabkan oleh adanya pandangan atau keyakinan di masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis "pekerjaan perempuan", seperti semua pekerjaan domestik, dianggap dan di nilai rendah di bandingkan dengan jenis pekerjaan yang di anggap sebagai "pekerjaan lelaki", serta dikategorikan sebagai "bukan produktif" sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara. Sementara itu kaum perempuan, karena anggapan gender ini, sejak dini telah disosialisasikan untuk menekuni peran gender mereka. Di lain pihak kaum lelaki tidak diwajibkan secara kultural untuk menekuni berbagai jenis pekerjaan tersebut.

Adat-Istiadat merupakan kebiasaan suatu kelompok dalam mempertahankan budaya-budaya di daerah tertentu, dimana adat-istiadat secara khusus terdiri dari nilai-nilai budaya, pandangan hidup, cita-cita, norma-norma dan hukum. Dalam adat-istiadat di suatu kelompok harus ada sistem nilai budaya. Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat-istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep-konsep mengenai apa yang hidup

dalam alam pikiran sebagian besar dari warga sesuatu masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup.

Menurut Koentjaraningrat (2000 : 190) tentang kedudukan Adat dalam konsepsi kebudayaan menurut tafsirannya " Adat merupakan perwujudan ideal dari kebudayaan. Ia menyebut adat selengkapnya sebagai adat tata kelakuan". Koentjaraningrat membagi Adat atas empat tingkat, yaitu: Tingkat Nilai Budaya, Tingkat Norma-Norma, Tingkat Hukum, dan Tingkat Aturan Khusus.

Adat yang berada pada tingkat nilai budaya bersifat sangat abstrak, ia merupakan ide-ide yang mengkonsesikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan suatu masyarakat. Seperti nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Adat pada tingkat norma-norma merupakan nilai-nilai budaya yang telah terkait kepada peran-peran tertentu (roles), peran sebagai pemimpin, peran sebagai mama, peran sebagai guru membawakan sejumlah norma yang menjadi pedoman bagi kelakuannya dalam hal memainkan peranannya dan berbagai kedudukan tersebut. Selanjutnya adat pada tingkat aturan-aturan yang mengatur kegiatan khusus yang jelas terbatas ruang lingkupnya pada sopan santun. Akhirnya adat pada tingkat hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum adat yang tidak tertulis.

Dari uraian-uraian di atas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, bahwa kebudayaan merupakan hasil dari budi-daya atau akal manusia, baik yang berwujud moril maupun materil. Di samping itu, adat sendiri dimaksudkan

dalam konsep kebudayaan dengan kata lain adat berada dalam kebudayaan atau bagian dari kebudayaan. Walaupun nilai-nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep, suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, sifatnya yang umum, luas dan tak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dari kebudayaan yang bersangkutan. Kecuali, para individu itu sejak kecil telah diresapi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya, sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan tak dapat diganti dengan nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.

Ridjal Fauzie mengatakan konstruksi sosial dalam memahami perempuan, kemudian di kembangkan, direkayasa, dicegah bahkan di perlakukan dalam kehidupan bermasyarakat mulai dari keluarga, masyarakat, budaya, sosial bahkan dalam kepercayaan (agama). Pembentukan pola pikir terhadap perempuan tidak hanya dipandang dalam aspek biologisnya tetapi dikaitkan dengan fungsi dan perannya yang kemudian menjadikan landasan berpikir dan falsafah hidup, sehingga menjelma menjadi ideologi.

Ada relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki. Laki-laki selalu mendominasi dalam segala bidang,

bukan karena perempuan tidak mampu mengambil peran dalam bidang tersebut, tetapi lebih karena tidak adanya kesempatan perempuan untuk berperan lebih di sana.

Ketertindasan perempuan, dipandang Nunuk, disebabkan oleh sebuah sistem nilai yang diberikan makna tertentu secara kultural. Nunuk menempatkan ketertinggalan perempuan pada tataran ideologi dan simbol kebudayaan. Dalam budaya universal, ketertindasan perempuan, menurut Nunuk merupakan manivestasi dari pemahaman antara budaya dan alam yang kemudian dibandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan pada peran sosialnya. Secara umum, kebudayaan memberikan pembedaan antara masyarakat manusia dan alam. Kebudayaan berupaya mengendalikan dan menguasai alam yang selanjutnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Oleh sebab itu kebudayaan berada pada posisi superior dan alam dipihak inferior. Kebudayaan diciptakan untuk menguasai, mengelola dan mengendalikan alam untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan masyarakat. Dalam hubungannya dengan laki-laki dan perempuan, maka perempuan selalu diasosiasikan dengan alam, dan laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan.

Dalam sistem sosial, masyarakat seringkali memiliki pemahaman yang keliru terhadap konsep gender dan seks. Pemahaman ini kemudian diperjelas dengan menekankan bahwa seks lebih menunjuk pada jenis kelamin, sedangkan gender lebih mengarah pada peran dan fungsi yang terbentuk dalam masyarakat secara sosial dan budaya. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki disebut dengan

gender. artinya bahwa konstruksi sosial terhadap peran tidak hanya terkait dengan jenis kelamin. Oleh karena itu, seks bersifat kodrati dan gender bersifat non-kodrati. Dengan kata lain, istilah seks digunakan pada aspek biologis seseorang, sedangkan istilah gender berkaitan pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non-biologis lainnya.

Perempuan akhirnya menanggung beban ganda akibat bias gender kerap kali diperkuat dan disebabkan oleh adanya keyakinan/pandangan masyarakat bahwa pekerjaan yang dianggap masyarakat sebagai jenis pekerjaan perempuan, seperti seluruh pekerjaan domestic, dianggap dan dinilai lebih rendah dibandingkan dengan jenis pekerjaan sebagai pekerjaan laki-laki dan dikategorikan sebagai pekerjaan yang bukan produktif sehingga tidak diperhitungkan baik dalam kalangan sosial, ekonomi agama. Pekerjaan ganda perempuan berkaitan dengan anggapan gender yang sosialisasikan untuk menekuni pemaknaan gender tersebut.

Masyarakat yang menganut budaya patriarki, ideologi gender menggeser wewenang perempuan dan memberi kekuasaan kepada laki-laki.⁵² Pergeseran kekuasaan ini berkembang dan merambah pada pembagian pekerjaan, kekuasaan, hak dan tanggung jawab baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.

Menurut Siti, ideologi gender memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hubungan antara laki-laki dan perempuan dan dipengaruhi atau mendapatkan legitimasi dari tafsir agama, budaya dan

sosial. Dampak terburuk dari pelegitimasi ini adalah diyakininya perbedaan gender sebagai ketentuan Tuhan atau takdir yang final.

Peter L. Berger memandang masyarakat sebagai proses berlangsungnya tiga momen dialektis yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi dalam legitimasi masyarakat itu sendiri, hal itu merupakan buatan masyarakat untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan sejarahnya dimasa lalu kenyataan sosial.

Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerja sama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan didalam pengalaman intersubjektif.

BAB VI

PERAN PEREMPUAN DALAM PELESTARIAN MANGROVE

Perempuan pesisir adalah istilah bagi kaum perempuan yang hidup di kawasan pesisir, baik yang hidup di lingkungan keluarga dengan aktivitas sebagai nelayan maupun yang di lingkungan pesisir dengan aktivitas mencari nafkah di luar kehidupan sebagai nelayan. Kedudukan dan peranan kaum perempuan pesisir sangat penting karena sistem pembagian kerja secara seksual yang terjadi pada masyarakat pesisir khususnya masyarakat nelayan. Selain itu terdapat beberapa masalah dalam integrasi kaum perempuan pesisir yang antara lain: kondisi pendidikan yang umumnya sangat rendah, tenaga kerja perempuan yang tidak dinilai secara objektif sedangkan beban kerjanya dalam keluarga cenderung lebih tinggi dan masih adanya nilai-nilai sosial budaya masyarakat sebagai penghambat berperannya kaum perempuan pesisir secara aktif (Sukesi, 2001).

Perhatian terhadap kawasan pesisir tidak hanya didasari oleh pertimbangan pemikiran bahwa kawasan itu tidak hanya menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, tetapi juga potensi sosial masyarakat yang akan mengelola sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan. Potensi sosial masyarakat ini sangat penting karena sebagian besar penduduk yang bermukim di

pesisir dan hidup dari pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tergolong miskin. Kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang perikanan (revolusi biru) selama ini ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pesisir, termasuk yang berada di kawasan pesisir (Sukeesi, 2001).

Indrayoga (2006), menyatakan bahwa masalah yang paling krusial dari perempuan adalah persoalan bagaimana mengangkat peran perempuan. Lebih lanjut dikatakan bahwa persoalan ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki hanya masalah pemikiran, yaitu laki-laki berpikir, bahwa perempuan berada satu tingkat di bawah laki-laki. Pemikiran seperti ini, sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dan akhirnya perempuan merasa bahwa dirinya adalah manusia kelas dua. Akibatnya kualitas perempuan menjadi rendah, sementara tuntutan kontribusi perempuan dalam pembangunan semakin penting dari waktu ke waktu.

Sistem pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat pesisir menempatkan secara tegas tentang peranan laki-laki dan perempuan. Laut adalah ranah kerja laki-laki (nelayan) dan darat adalah ranah kerja perempuan pesisir. Kegiatan utama laki-laki adalah menangkap ikan, sedangkan kaum perempuannya mengolah dan menjualkan hasil tangkapan suami. Sebagian besar waktu dihabiskan nelayan untuk menangani pekerjaan melaut, tidak cukup kesempatan bagi nelayan mengurus aktivitas sosial ekonomi di darat. Sebaliknya, perempuan pesisir menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangani

pekerjaan-pekerjaan di darat. Karakteristik geografis dan mata pencaharian di kawasan pesisir telah membentuk peranan sosial-ekonomi yang khas para nelayan dan isterinya (Kusnadi, 2006).

Peran domestik perempuan pesisir dilaksanakan dalam kedudukan sebagai isteri dari suami dan ibu dari anak-anaknya. Pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah pekerjaan-pekerjaan di seputar rumah tangga, seperti menangani pekerjaan dapur, membersihkan rumah, mengasuh dan mendidik anak, menyediakan kebutuhan sekolah anak-anak, dan menyiapkan bekal suami melaut. Bagi rumah tangga nelayan yang mampu, mereka akan meminta bantuan kerabatnya untuk meringankan tanggung jawab pekerjaan domestik. Posisi suami dalam tanggung jawab domestik ini bersifat "membantu semata", jika kesempatan memungkinkan. Peranan domestik adalah kewajiban pertama perempuan pesisir (Kusnadi, 2006).

Kewajiban kedua yang harus dijalani oleh perempuan pesisir adalah peran produktif. Peran produktif adalah peran perempuan pesisir untuk memperoleh penghasilan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Usaha yang dilakukan perempuan pesisir untuk mendapatkan pendapatan ekonomi ini adalah dengan jalan menjualkan hasil tangkapan (ikan) suami; bekerja pada orang lain, seperti menjadi buruh pada usaha pemindangan ikan; dan atau memiliki unit usaha sendiri, seperti membuka toko/warung, pedagang perantara, dan pemilik usaha pengolahan hasil perikanan. Kegiatan perdagangan ikan (segar atau olahan) merupakan

pekerjaan yang banyak ditekuni oleh isteri-isteri nelayan. Perempuan pesisir merupakan "penguasa ekonomi darat" (Kusnadi, 2006).

Kewajiban ketiga adalah ikut mengelola potensi komunitas, yang hasil akhirnya juga untuk kepentingan ekonomi dan investasi sosial rumah tangga masyarakat pesisir. Peranan ini diwujudkan dalam bentuk keterlibatan kaum perempuan mengikuti arisan, simpan-pinjam, simpanan, sumbangan timbal-balik hajatan, dan kegiatan gotong-royong lainnya. Dengan memasuki pranata-pranata tersebut, perempuan pesisir berpartisipasi mengelola potensi sumber daya sosial ekonomi masyarakat yang suatu saat dapat dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan rumah tangga, seperti ketika penghasilan dari melaut menurun, didera sakit, biaya hajatan keluarga, membeli keperluan sekolah anak, menyiapkan kebutuhan hari raya, atau kebutuhan mendadak lainnya. Perempuan pesisir sangat kreatif menciptakan berbagai jenis pranata sosial-ekonomi sebagai jawaban untuk mengatasi fluktuasi ekonomi dari kegiatan penangkapan (Kusnadi, 2006).

Ketiga jenis tanggung jawab di atas telah menempatkan posisi sosial dan peranan ekonomi perempuan pesisir yang cukup kuat dan mendominasi, baik pada tataran rumah tangga, maupun tataran masyarakat. Pada tataran rumah tangga, perempuan pesisir menjadi "salah satu tiang ekonomi" rumah tangga, sejajar dengan suami-suami mereka. Hubungan fungsional suami-isteri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga bersifat saling-melengkapi. Perempuan pesisir tidak sekedar

“melengkapi atau membantu” pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi ikut menentukan tersedianya sumber daya ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tiang ekonomi rumah tangga itu akan terancam roboh. Karena posisi ekonomi perempuan seperti ini, posisi sosial mereka dalam berhadapan dengan suami di rumah tangga juga cukup kuat. Istri mengontrol sebagian besar pengelolaan dan pengeluaran sumber daya ekonomi rumah tangga. Tidak ada pengeluaran sumber daya ekonomi rumah tangga, termasuk memenuhi kebutuhan suami, seperti membeli rokok dan perlengkapan melaut, yang terlepas dari “restu” isteri. Pola-pola perilaku kultural ini dipandang sebagai kewajiban dan kebajikan yang harus dipatuhi suami-isteri nelayan agar rumah tangga terjaga keutuhannya (Kusnadi, 2006).

Dominasi perempuan pesisir dalam sektor ekonomi pada tataran sosial (masyarakat pesisir), telah menempatkan mereka sebagai kontributor penting terhadap dinamika ekonomi kawasan pesisir. Stabilitas dinamika ekonomi pesisir sangat menentukan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peranan yang demikian dapat dirasakan jika kita mengamati kehidupan sosial-ekonomi di desa-desa nelayan yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar. Kontribusi ekonomi perempuan pesisir terhadap kehidupan masyarakatnya merupakan wujud kapasitas aktualisasi diri mereka dan sebagai realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Mereka dapat dianggap sebagai modal pemberdayaan. Perempuan

peisir yang harus bekerja dalam konteks ketiga jenis tanggung jawab di atas merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan kehidupan, yang dianut dan disetujui oleh sebagian besar warga masyarakat peisir. Dengan demikian, dalam menghadapi kerentanan ekonomi dan kemiskinan masyarakat nelayan, pihak yang paling terbebani dan bertanggung jawab untuk mengatasi dan menjaga kelangsungan hidup rumah tangga adalah kaum perempuan, istri nelayan (Kusnadi, 2003).

Dibandingkan dengan masyarakat lain, kaum perempuan di desa-desa nelayan mengambil kedudukan dan peranan sosial yang penting, baik di sektor domestik maupun di sektor publik. Peranan publik istri nelayan diartikan sebagai keterlibatan kaum perempuan dalam aktivitas sosial-ekonomi di lingkungannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan kebutuhan sekunder lainnya. Kaum perempuan di desa nelayan merupakan potensi sosial yang sangat strategis untuk mendukung kelangsungan hidup masyarakat nelayan secara keseluruhan. Oleh karena itu, potensi sosial-ekonomi kaum perempuan ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Hal ini juga berlaku di negara-negara Asia lainnya, misalnya di Filipina, perempuan memegang peranan penting pada konservasi lahan mangrove, mulai dari pengadaan bibit, penanaman sampai pada pengawasan, sehingga mereka memperoleh tambahan pendapatan untuk keluarganya (Farisal, et al., 2012).

Kemiskinan nelayan merupakan suatu ironi bagi sebuah negara maritim seperti Indonesia, walau data yang valid

tidak mudah diperoleh. Pengamatan visual/langsung ke kampung-kampung nelayan dapat memberikan gambaran yang jauh lebih gamblang tentang kemiskinan nelayan di tengah kekayaan laut yang begitu besar (Dahuri, et al., 2004). Gambaran umum yang pertama kali bisa dilihat dari kondisi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi dalam kehidupan masyarakat nelayan adalah fakta-fakta yang bersifat fisik berupa kualitas pemukiman. Kampung-kampung nelayan miskin akan mudah diidentifikasi dari kondisi rumah hunian mereka. Rumah-rumah yang sangat sederhana, berdinding anyaman bambu, berlantai papan yang terlihat usang, beratap rumbia, dan keterbatasan pemilikan perabotan rumah tangga adalah tempat tinggal para nelayan buruh dan nelayan tradisional. Sebaliknya, rumah-rumah yang megah dengan segenap fasilitas yang memadai akan mudah dikenali sebagai tempat tinggal pemilik perahu, pedagang perantara (ikan) atau pedagang berskala besar, dan pemilik toko (Kusnadi, 2003 dan Sitorus,1994).

Namun demikian, kaum perempuan pesisir dalam kehidupan keseharian banyak memberikan kontribusinya dalam mensosialisasikan kegiatan pelestarian mangrove. Mobilitas kegiatan tinggi seperti aktivitas domestik yang berkaitan dengan kegiatan sosial internal rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami, dan kegiatan publik yang berkaitan dengan aktivitas sosial (arisan dan dasa wisma) serta kegiatan ekonomi dan politik, maka kaum perempuan dapat dijadikan sebagai salah satu motor penggerak di masyarakat dalam

mentransformasikan informasi mengenai pentingnya pelestarian sumber daya pesisir (Kusnadi, 2006).

Bentuk-bentuk penyampaian yang dilakukan dengan cara informal tanpa terjadwal dan dapat dilakukan setiap saat baik kepada orang dewasa maupun anak-anak memiliki hasil yang cenderung lebih cepat diterima oleh masyarakat di banding jika dilakukan dengan cara formal. Selain itu juga karena perempuan termasuk salah satu penyumbang dampak negatif yang cukup besar bagi kerusakan lingkungan seperti penyumbang sampah rumah tangga maupun sampah pribadi. Jika keinginan untuk memelihara lingkungan datangnya dari kaum perempuan maka efek-efek tersebut dapat dikurangi (Kusnadi, 2006).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratisti, et al., (2012) di Desa Pasar Banggi Kabupaten Rembang menemukan bahwa peran perempuan dalam konservasi mangrove masih dibatasi pada kerja teknis, yaitu sebagai tenaga pembibitan dan pemelihara tanaman mangrove. Perempuan belum dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Namun perkembangan positif kegiatan konservasi mangrove telah memberikan kesempatan perempuan untuk terlibat dalam kegiatan domestik dan produktif. Oleh karena itu program-program penguatan kapasitas perempuan perlu terus dikembangkan untuk mendorong kelompok perempuan terlibat dalam kegiatan konservasi mangrove.

Peranan serta wanita dalam pengelolaan sumberdaya alam dibutuhkan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan meningkatkan beban suami dalam mencari

nafkah. Selain berperan mengurus rumah tangga, wanita juga berperan untuk memperoleh pendapatan sehingga dapat di katakan bahwa wanita memiliki peranan ganda dalam keluarga. Peranan wanita untuk bekerja produktif memegang pengaruh penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perempuan merupakan suara potensi, dimana saat ini dalam persaingan global yang semakin menguat dan ketat, maka partisipasi perempuan menjadi sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang dimasa yang akan datang. Posisi perempuan yang selama ini cenderung diletakkan lebih rendah daripada laki-laki, menyebabkan kemampuan perempuan untuk berkontribusi dan mengembangkan potensi tidak maksimal.

Dalam hal inilah keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan fenomena penting pada era globalisasi ini. Perempuan Indonesia pedesaan terutama kalangan menengah ke bawah hampir seluruhnya terlibat dalam kegiatan ekonomi. Mereka berupaya memperbaiki ekonomi keluarga dengan bekerja di desa dan tidak jarang pula meninggalkan desa. Kemampuan perempuan dalam memberikan kontribusi secara ekonomi terhadap pendapatan keluarga/rumah tangganya, akan meningkatkan status sosial keluarganya dalam masyarakat, namun keterbatasan keterampilan dan kemampuan dalam menguasai teknologi menjadi penghambat dalam mencari pekerjaan.

Keterlibatan wanita desa hutan merupakan upaya untuk menciptakan dan pemberdayaan wanita serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Peran serta wanita dalam pengelolaan sumberdaya hutan bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan meringankan beban kepala keluarga dalam mencari nafkah (Huda, 2013).

Banyak anggapan bahwa kaum pria lebih berperan dalam segala hal termasuk pengelolaan sumberdaya hutan sedangkan kaum wanita hanya berperan untuk mengurus rumah tangga saja (Wibisono, 2010). Anggapan tersebut bukanlah alasan untuk wanita tidak melakukan pekerjaan selain mengurus rumah tangga. Selain berperan mengurus rumah tangga, wanita juga berperan untuk memperoleh pendapatan sehingga dapat dikatakan bahwa wanita memiliki peran ganda dalam keluarga. Peran wanita untuk bekerja produktif memegang pengaruh penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga (Asyisyifa dkk, 2013). Dengan adanya peran ganda yang dimiliki 3 oleh wanita, wanita membutuhkan pembagian waktu antara mengurus rumah tangga dan melakukan pekerjaan produktif.

Keterlibatan wanita desa hutan merupakan upaya untuk menciptakan dan pemberdayaan wanita serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Peran serta wanita dalam pengelolaan sumberdaya hutan bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga dan meringankan beban kepala keluarga dalam mencari nafkah (Huda, 2013). Banyak anggapan bahwa kaum pria lebih berperan dalam segala hal termasuk pengelolaan sumberdaya hutan

sedangkan kaum wanita hanya berperan untuk mengurus rumah tangga saja (Wibisono, 2010).

Disini membuat kaum perempuan rela menjadi buruh kerja dengan pendapatan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kebutuhan yang tidak pernah habis dan perkembangan zaman pula membuat kebutuhan bervariasi untuk mendapatkan nilai imajinal bagi pemenuhan kebutuhan keluarga. Seharusnya para lelaki yang bertugas mencari nafkah, namun tidak cukup memenuhi kebutuhan sehingga membuat kaum perempuan yang mulanya harus mengurus rumah tangga, sekarang harus ikut terlibat untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan adanya partisipasi perempuan dalam memenuhi kebutuhan yang awalnya hanya memenuhi kebutuhan subsistensi, ternyata juga dapat menyokong ekonomi daerahnya. Sehingga membuat kemajuan dalam pembangunan ekonomi daerahnya. Inilah yang membuat sosok perempuan perlu berpartisipasi dalam pembangunan daerah, salah satunya dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

Indonesia merupakan negara dengan sumberdaya hutan yang cukup luas merupakan wilayah di Indonesia yang mempunyai sumberdaya hutan dengan keunikan tersendiri yaitu memiliki Hutan mangrove (Wanatani mangrove). Dengan adanya sumberdaya hutan, pengelolaan hutan yang baik dan bijaksana oleh masyarakat dibutuhkan agar hutan tetap lestari. Pengelolaan hutan oleh masyarakat erat kaitannya dengan peran wanita dalam mengelola hutan. Peran wanita sangat dibutuhkan guna meningkatkan

kelestarian serta memperoleh manfaat dari adanya pelestarian hutan.

Hutan mangrove adalah ekosistem hutan daerah pantai yang terdiri dari kelompok pepohonan yang bisa hidup dalam lingkungan berkadar garam tinggi. Salah satu ciri tanaman mangrove memiliki akar yang menyembul ke permukaan. Penampakan mangrove seperti hamparan semak belukar yang memisahkan daratan dengan laut. Kata mangrove berasal dari kata mangué (bahasa Portugis) yang berarti tumbuhan, dengan grove (bahasa Inggris) yang berarti belukar. Sementara itu dalam literatur lain disebutkan bahwa istilah mangrove berasal dari kata mangi-mangi (Bahasa Melayu Kuno). Hutan mangrove adalah suatu kelompok jenis tumbuhan berkayu yang tumbuh disepanjang garis pantai tropis dan subtropis yang terlindung dan memiliki semacam bentuk lahan pantai dengan tipe tanah anaerob.

Masyarakat setempat melakukan rehabilitasi kawasan pesisir dengan menanam mangrove dan mengurangi dampak abrasi dengan memasang APO (Alat Pemecah Ombak). Di Baros APO dibuat dengan membuat konstruksi pagar terdiri dari bambu ori sebagai tiang dan bambu apus sebagai bentang yang dibalut dengan jaring paranet. Jaring paranet secara teknis kuat, tahan terhadap air payau dan sinar matahari dan sampah. Bambu ori sebagai tiang memiliki diameter yang lebih lebar dan tebal dibanding bambo lainnya. Bentuk APO yang dibangun di Baros adalah bentuk "U" menghadap daratan dan lingkaran dengan ukuran hingga ratusan meter disesuaikan medan lahan

tanam seperti pada Gambar 3. APO berfungsi untuk melindungi tanaman mangrove dan lahan tanaman dari hempasan ombak dan sampah. Upaya ini sejalan dengan hasil penelitian Yulistiyanto (2009) yang menyimpulkan bahwa perlindungan dan pengamanan pantai dapat dilakukan dengan reboisasi mangrove sebagai bentuk perlindungan alami. Namun, reboisasi mangrove memerlukan dukungan struktur APO yang baik agar tanaman mangrove dapat tumbuh cukup besar sehingga mampu menahan gelombang.

BAB VII

TEORI PEMILAHAN PERAN

Teori *nature* dikembangkan oleh Edward L.Thorndike pada tahun 1903, menurut teori *nature*, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat dan lebih menekankan pada faktor gen dan karakteristik dasar (yang ada sejak lahir), sehingga harus diterima. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak dapat dipertukarkan karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya (Wade, 2007).

Munculnya teori ini, dapat dikatakan diilhami oleh sejumlah teori filsafat sejak era kuno. Dalam konteks filsafat Yunani Kuno, misalnya, dinyatakan bahwa alam dikonseptualisasikan dalam pertentangan kosmik yang kembar, misalnya: siang-malam, baik-buruk, kesinambungan-perubahan, terbatas-tanpa batas, basah-kering, tunggal-ganda, terang-gelap, akal-perasaan, jiwa-raga, laki-perempuan, dan seterusnya. Dengan demikian, ada dua entitas yang selalu berlawanan, yang berada pada titik eksistensial yang asimetris dan tidak berimbang. Dalam hal ini, kelompok pertama selalu dikonotasikan secara positif dan dikaitkan dengan laki-laki, sedangkan kelompok kedua berkonotasi negatif yang selalu dikaitkan dengan perempuan (Hein, 1989).

Teori Nurture dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1925, menurut teori nurture, perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikan dengan kelas borjuis (kaum penindas) dan perempuan sebagai kaum proletar (kaum tertindas), menitik beratkan pada proses belajar dan pengalaman (Wade, 2007).

Implikasi dari perbedaan nature dan nurture tersebut adalah terjadinya pemisahan sektor kehidupan. Perempuan yang diidentifikasi sebagai "nature", dianggap sebagai orang yang berkaitan erat dengan sektor domestik, sedangkan laki-laki ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang ini kemudian menjadi fakta sosial tentang status-status dan peran-peran yang dimainkan oleh perempuan (Abdullah, 2006).

Terjadinya keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena dikonstruksi oleh budaya yang dipengaruhi oleh peluang laki-laki yang lebih besar untuk berperan aktif terhadap dunia luar. Laki-laki yang memiliki akses yang lebih besar terhadap sektor produktif kemudian dikonstruksikan untuk berperan sosial di sektor publik, sedangkan perempuan mempunyai tugas mulia 4 (empat) M, yaitu

mensturasi, mengandung, melahirkan dan menyusui, dikonstruksikan untuk berperan di sektor “sosial domestik”, yaitu menguasai rumahtangga, anak dan melayani laki-laki (suami). Perempuan yang baik dipresentasikan sebagai ibu maupun istri yang terkait dengan rumah, anak, masakan, pakaian, kecantikan, kelembutan dan keindahan (Abdullah, 2006).

Teori nurture sebenarnya merupakan “bantahan” terhadap teori nature. Teori nurture tidak setuju bahwa pemilahan posisi dan peran, antara laki-laki dan perempuan merupakan kodrat alam. Faktor biologis tidak menyebabkan keunggulan laki-laki terhadap perempuan, pemilahan sekaligus pengunggulan terhadap laki-laki disebabkan karena elaborasi kebudayaan terhadap biologis masing-masing (Sanderson, 1995). Dengan demikian, apa yang disebut sifat kelelakian dan kewanitaan merupakan hasil pemupukan kebudayaan, lebih khusus melalui pendidikan.

Menurut Budiman (1982) usaha untuk membagi manusia menjadi dua golongan, laki-laki dan perempuan, dan usaha untuk membedakan keduanya dalam posisi dan peranan sosial berbeda merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Jadi, apa yang disebut dengan kodrat perempuan adalah merupakan buatan, yaitu hasil kombinasi antara tekanan dan paksaan disuatu pihak dengan rangsangan yang tidak wajar, sekaligus menyesatkan pihak lain, khususnya perempuan.

Menurut teori kebudayaan dengan perspektif materialis, terjadinya keunggulan laki-laki terhadap perempuan karena dikonstruksi oleh budaya dengan bergesernya pemilihan

benda yang bersifat komunal menjadi pribadi. Semula harta benda dan rumahtangga milik yang ada di dalamnya menjadi milik dan tanggung jawab bersama. Perempuan memiliki hak dan kontribusi yang sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kelompok/rumahtangganya. Namun dengan berkembangnya hak milik pribadi, kesetaraan tersebut bergeser. Laki-laki memiliki peluang lebih besar untuk menguasai hak milik pribadi tersebut, karena laki-laki tidak disibukan oleh tanggung jawab mengandung dan mengasuh anak, laki-laki menjadi lebih leluasa meraih dan memilikinya. Hak milik pribadi atas benda yang merupakan sumberdaya ekonomi, memungkinkan laki-laki memiliki kontrol terhadap seluruh kontrol kehidupan sosial budaya yang lain. Termasuk kehidupan rumahtangganya. Dengan demikian, kekuasaan laki-laki lebih tinggi daripada kekuasaan perempuan karena konstruksi budaya kepemilikan benda pribadi yang bernilai ekonomi, termasuk pemilikan terhadap perempuan (Sanderson, 1995).

A. Teori Pembagian Kerja (*Division of Labour*): Emile Durkheim

The Division of Labor in Society (Pembagian Kerja dalam Masyarakat) adalah karya Emile Durkheim (1893) , yang meneliti bagaimana tatanan sosial dipertahankan dalam berbagai bentuk masyarakat. Ia memusatkan perhatian pada pembagian kerja, dan meneliti bagaimana hal itu berbeda dalam masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Pembagian kerja dalam masyarakat muncul ketika proses evolusi sosial dari masyarakat tradisional

yang terikat oleh kesadaran kolektif yang kuat menuju kepada masyarakat modern yang kompleks. Durkheim mengkategorikan masyarakat tradisional ke dalam masyarakat bertipe solidaritas mekanis, sedangkan pada masyarakat modern, pembagian kerja sangat kompleks, dikategorikan sebagai tipe masyarakat dengan ciri solidaritas "organis" (Ritzer dan Goodman, 2004).

Solidaritas adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh sebuah masyarakat ataupun kelompok sosial karena pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan solidaritas. Menurut Johson (1988) solidaritas menunjuk pada suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada keadaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Ikatan ini lebih mendasar daripada hubungan kontraktual yang dibuat atas persetujuan rasional, karena hubungan-hubungan serupa itu mengandaikan sekurang-kurangnya satu tingkat/derajat konsensus terhadap prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kontrak itu.

Durkheim (1893) dalam Johson (1988) membagi solidaritas sosial kedalam dua tipe yaitu solidaritas mekanis dan organis.

1. Solidaritas Mekanis

Masyarakat yang ditandai oleh solidaritas mekanis menjadi satu dan padu karena seluruh orang adalah generalis. Ikatan dalam masyarakat ini terjadi karena mereka terlibat aktivitas dan juga tipe pekerjaan yang sama dan memiliki tanggung jawab yang

sama. Sebaliknya, masyarakat yang ditandai oleh solidaritas organik bertahan bersama justru karena adanya perbedaan yang ada didalamnya, dengan fakta bahwa semua orang memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang berbeda-beda (Ritzer dan Goodman, 2004). Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif memiliki kesadaran kolektif yang lebih kuat yaitu pemahaman norma dan kepercayaan bersama. Peningkatan pembagian kerja menyebabkan menyusutnya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif lebih terlihat dalam masyarakat yang ditopang oleh solidaritas mekanis daripada masyarakat yang ditopang oleh solidaritas organik. Masyarakat modern lebih mungkin bertahan dengan pembagian kerja dan membutuhkan fungsi-fungsi yang dimiliki orang lain daripada bertahan pada kesadaran kolektif. Oleh karena itu meskipun masyarakat organik memiliki kesadaran kolektif, namun dia adalah bentuk lemah yang tidak memungkinkan terjadinya perubahan individual (Ritzer dan Goodman, 2004).

2. Solidaritas Mekanis

Masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanis, kesadaran kolektif melingkupi seluruh masyarakat dan seluruh anggotanya, sangat diyakini, sangat mendarah daging, dan isinya sangat bersifat *religious*. Sementara dalam masyarakat yang memiliki solidaritas organik, kesadaran kolektif dibatasi pada sebagian kelompok, tidak dirasakan terlalu mengikat, kurang mendarah daging, dan isinya hanya kepentingan individu yang

lebih tinggi dari pedoman moral (Ritzer dan Goodman, 2004).

Masyarakat yang menganut solidaritas mekanis, yang diutamakan adalah perilaku dan sikap. Perbedaan tidak dibenarkan. Menurut Durkheim, seluruh anggota masyarakat diikat oleh kesadaran kolektif, hati nurani kolektif yaitu suatu kesadaran bersama yang mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, dan bersifat ekstrim serta memaksa (Kamanto, 2004). Solidaritas organis merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian. Setiap anggota menjalankan peran yang berbeda, dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologis. Bisa dikatakan bahwa pada solidaritas organis ini menyebabkan masyarakat yang ketergantungan antara yang satu dengan yang lainnya, karena adanya saling ketergantungan ini maka ketidakhadiran pemegang peran tertentu akan mengakibatkan gangguan pada sistem kerja dan kelangsungan hidup masyarakat. Keadaan masyarakat dengan solidaritas organis ini, ikatan utama yang mempersatukan masyarakat bukan lagi kesadaran kolektif melainkan kesepakatan yang terjalin diantara berbagai kelompok profesi (Kamanto, 2004).

Pembagian kerja dan peran perempuan dalam pelestarian mangrove bersifat fungsional, yang menjamin terpeliharanya solidaritas sosial, sebab keduanya merupakan bagian dari struktur sosial. Secara khusus,

peran perempuan dalam pelestarian mangrove, dalam teori Durkheim dapat terjadi pada masyarakat bertipe solidaritas mekanik. Sebagai sebuah institusi, peran tersebut hanya dapat berlangsung secara fungsional jika seluruh warga masyarakat mengetahui, menyadari, menyepakati dan mensosialisasikannya. Dan hanya jika terdapat alasan-alasan tertentu bahwa peran perempuan tersebut adalah bagian dari aktivitas kesatuan sosial, maka peran perempuan dalam pelestarian mangrove akan menjadi penciri homogenitas yang terkait sebagai bagian dari kesadaran kolektif.

Meskipun demikian, dengan alasan-alasan yang berbeda, peran perempuan dalam pelestarian mangrove, juga dapat terjadi pada tipe masyarakat solidaritas organis. Alasan tersebut dimulai dengan norma dan nilai budaya yang oleh Durkheim disebut sebagai struktur social (Jones, 2009). Intensitas kesadaran yang terinternalisasi secara meluas dan mendalam akan mengkristal ke dalam nilai dan norma, yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat sebagai sebuah institusi sosial.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pelestarian mangrove berbasis peran perempuan menurut teori Durkheim dapat terjadi baik pada masyarakat bertipe solidaritas organis maupun pada masyarakat bertipe solidaritas mekanis. Hal ini dipengaruhi oleh faktor kultural berupa nilai-nilai yang hidup dan menjadi sebuah lembaga/institusi sosial yang berperan secara fungsional. Sedangkan faktor sosiologikal yang bersifat struktural dalam bentuk tekanan ekonomi dengan atau tanpa nilai

dan kelembagaan kesetaraan gender akan mempengaruhi proses terbentuknya pembagian kerja tersebut.

B. Teori Tindakan Rasional: Max Weber

Weber (1947) dikenal dengan teori tindakan, yaitu individu bebas memilih, semua tindakan ditentukan oleh faktor internal (jiwa, pemikiran) manusia itu sendiri bukan lingkungan (Johnson, 1988).

Weber memilih konsep rasionalitas sebagai titik pusat perhatian utamanya, karena menurut Weber, konsep rasionalitas sama pentingnya dengan konsep solidaritas Durkheim. Tindakan manusia terbagi menjadi dua, yaitu tindakan tidak rasional dan tindakan rasional. Tindakan rasional inilah yang membawa kearah perubahan social secara kualitatif-akumulatif (Johnson, 1988).

Menurut Weber (1947) dalam Johnson (1988), tindakan sosial dapat digolongkan menjadi empat kelompok (tipe), yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afeksi.

1. Tindakan Rasional Instrumental

Tindakan ini dilakukan seseorang dengan memperhitungkan kesesuaian antara cara yang digunakan dengan tujuan yang akan dicapai.

2. Tindakan Rasional Berorientasi Nilai

Tindakan ini bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya, tetapi tujuan yang hendak dicapai tidak terlalu dipentingkan oleh si pelaku. Pelaku hanya beranggapan bahwa yang paling penting tindakan

itu termasuk dalam kriteria baik dan benar menurut ukuran dan penilaian masyarakat di sekitarnya.

3. Tindakan Tradisional

Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak rasional. Seseorang melakukan tindakan hanya karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tanpa menyadari alasannya atau membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai tujuan dan cara yang akan digunakan.

Apabila dalam kelompok-kelompok atau masyarakat didominasi oleh orientasi ini, maka kebiasaan dan institusi mereka didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan atau pertimbangan. Satu-satunya pembenaran yang dilakukan adalah bahwa, "inilah cara yang sudah dilakukan nenek moyang kami, dan demikian pula nenek moyang mereka sebelumnya, ini adalah cara yang sudah begini dan akan selalu begini terus".

Weber melihat tipe tindakan ini sedang hilang lenyap karena meningkatnya rasional instrumental. Semakin tindakan rasional instrumental berkembang di suatu masyarakat maka dengan sendirinya kebiasaan dan tradisi yang ada dalam masyarakat akan berangsur hilang. Seseorang yang berpikir rasional akan pentingnya alat dan tujuan, maka dia akan mempertimbangkan setiap tindakan yang dilakukannya, dengan begitu hal-hal atau tindakan yang manfaatnya tidak dapat dibuktikan secara

obyektif oleh pikirannya akan ditinggalkan mengingat fungsinya yang tidak jelas. Hal tersebut terkait dengan tiga hukum Comte yang menjelaskan perkembangan masyarakat dari tahap teologis-metafisik-positivis. Dimana pada tahap positivis manusia akan berpikir modern dan percaya terhadap hal-hal yang empiris.

4. Tindakan Afektif

Tipe tindakan ini ditandai oleh dominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan yang sadar. Seseorang yang sedang mengalami perasaan meluap-luap seperti cinta, ketakutan, kemarahan, atau kegembiraan, dan secara spontan mengungkapkan perasaan itu tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektif. Tindakan itu benar-benar tidak rasional karena kurangnya pertimbangan yang logis, ideologi, atau kriteria rasionalitas lainnya.

Tindakan ini sebagian besar dikuasai oleh perasaan atau emosi tanpa pertimbangan-pertimbangan akal budi. Seringkali tindakan ini dilakukan tanpa perencanaan matang dan tanpa kesadaran penuh. Jadi dapat dikatakan sebagai reaksi spontan atas suatu peristiwa.

Bagi Weber, konsep rasionalitas merupakan kunci bagi suatu analisa obyektif mengenai arti-arti subjektif dan juga merupakan dasar perbandingan mengenai jenis-jenis tindakan sosial yang berbeda. Menurut Weber, "tindakan obyektif" adalah pengalaman subyektif yang dapat dimengerti oleh orang lain, karena dialami secara bersama dan meluas, sedangkan

“tindakan subyektif” adalah pengalaman subyektif yang tidak dapat dikomunikasikan atau dimengerti oleh kehidupan bersama, meskipun hal itu sangat riil bagi yang bersangkutan (Campbell, 1981). Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakan-tindakan sosial.

Inti dari teori Weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran dari teori Max Weber (1947) tentang tindakan sosial, maka pemakaian teori Weber sebagai *theoretical orientation* dalam memahami pelestarian mangrove berbasis peran perempuan adalah sesuai, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pola tindakan individu untuk melakukan pelestarian mangrove tidak lepas dari pertimbangan yang bersifat obyektif maupun subyektif.
2. Tindakan perempuan untuk melakukan pelestarian mangrove memberikan berbagai dampak dalam perubahan status perempuan dalam masyarakat dan keluarga.
3. Tindakan perempuan untuk melakukan pelestarian mangrove, berdasarkan pada suatu pertimbangan

rasional instrumental, yaitu: (1) berdasarkan tujuan tertentu yang hendak dicapai; (2) ada skala prioritas atau kriteria-kriteria dalam mencapai tujuan; (3) sebelum melakukan tindakan, dipikirkan aspek positif atau negatif yang akan muncul dari tindakan tersebut; (4) kemampuan meramalkan atau memprediksikan ke depan dari tindakan tersebut.

C. Teori Struktur Fungsional : Talcott Parsons

Teori struktur fungsional Talcott Parsons (1937) adalah upaya untuk menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian yang lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Asumsi dasar teori ini adalah semua elemen harus berfungsi atau fungsional sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik (Raho, 2007).

Parsons berpendapat bahwa ada empat fungsi penting yang diperlukan dalam menganalisis semua sistem "tindakan" manusia untuk pemeliharaan pola di masyarakat, yaitu **Adaptation**, **Goal attainment**, **Integration** dan **Latensi** (Ritzer dan Goodman, 2004). Sering disingkat dengan akronim AGIL. Keempat fungsi ini saling berhubungan timbal balik dan untuk kelangsungan hidupnya, maka masyarakat harus menjalankan fungsi-fungsi tersebut, yaitu:

1. Adaptasi (*adaptation*); sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.
2. Pencapaian tujuan (*goal attainment*): sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi (*integration*): sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya (A,G,L).
4. Pemeliharaan pola (*latency*): sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Oleh karena itu, AGIL selalu dikaitkan dengan empat sistem tindakan, yaitu sistem tindakan yang memberi jaminan fungsi adaptasi dengan cara penyesuaian dan mentransformasikan kepada dunia eksternal. Sistem kepribadian menunjukan kepada fungsi pencapaian tujuan dengan cara mendefinisikan sistem tujuan dan mobilisasi sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Sistem sosial menjamin integrasi berjalan dengan cara mengendalikan bagian-bagiannya. Sistem budaya menjamin fungsi *latency* dengan menyediakan norma/nilai kepada aktor yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan (Raho, 2007).

Berdasarkan perspektif struktur fungsional Parsons (1937), yang menganalogikan "masyarakat sebagai suatu

organisme hidup”, maka hal ini dapat juga digunakan untuk menganalogikan keluarga atau masyarakat maupun organisme hidup bersama-sama mengalami proses pertumbuhan. Parsons menganalogikan keluarga sebagai sebuah sistem sosial terkecil, sehingga jika peran-peran perempuan dalam lingkungan dan keluarga menyumbang pada stabilitas lingkungan, keluarga dan masyarakat di lihat sebagai sesuatu yang fungsional, maka akan terjadi harmoni dalam kehidupan lingkungan, keluarga dan masyarakat, karena bagian-bagian yang ada akan saling bekerjasama dan saling melengkapi.

Di lihat dari konteks keterhubungan fungsinya, maka pelestarian mangrove berbasis peran perempuan, menggambarkan bahwa status mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial dan peran perempuan mengacu pada apa yang dilakukan oleh aktor (perempuan), maka ketika berbicara mengenai aktor pada perspektif Parsons, faktor penting dalam peran perempuan adalah keinginan untuk melakukan yang terbaik dalam mencapai suatu kepuasan dalam mendapatkan prestasi pribadi yaitu pelestarian mangrove.

BAB VIII

TEORI ANALISIS GENDER

Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa (RI, 2003). Perencana kebijakan menggunakan analisis gender untuk menilai dampak kebijakan bagi perempuan dan laki-laki atas program dan atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan. Analisis gender mengakui bahwa realitas kehidupan perempuan dan lelaki adalah berbeda, sedangkan kesempatan yang sama tidak harus berarti menghasilkan output yang sama (KPP, 2002b; Handayani dan Sugiarti, 2002).

Analisis gender dilakukan sebagai langkah awal dalam rangka penyusunan kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender, dengan memperhatikan :

1. Akses atau kesempatan antara laki-laki dan perempuan sama atau mengalami kesenjangan.
2. Kontrol atau pola kekuasaan antara laki-laki dan perempuan

3. Partisipasi yaitu bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi atau berperan aktif dalam program pembangunan
4. Manfaat yang diterima antara laki-laki dan perempuan sama atau mengalami kesenjangan dari hasil pembangunan.

Analisis gender dimulai dengan data dan fakta serta informasi tentang gender, yaitu data terpilah antara laki-laki dan perempuan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecahan masalahnya secara tepat. Analisis gender sangat penting, khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencana di setiap sektor karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit sehingga program yang berwawasan gender dapat diwujudkan (Astuti, 2002).

Ada beberapa teknik analisis gender yang dapat dipergunakan, yaitu analisis gender Moser, Harvard, Longwe, Munro, Capacities and Vulnerabilities Analysis (CVA), Gender Analysis Matrix (GAM), The Logical Framework Matriks Longframe (Matrik Kerangka Kerja Logik) dan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) berdimensi Gender (Trisakti, 2002) serta Gender Analysis Pathway (GAP).

Analisis gender yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Harvard dan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Tahap ini ditujukan untuk mengetahui apakah sebuah kebijakan, responsif gender atau tidak. Ini ibarat sebuah kegiatan untuk men-“diagnosa” kebijakan. Langkah awal dalam tahap ini adalah mengidentifikasi tujuan atau sasaran kebijakan yang ada saat ini, serta tujuan atau sasaran kebijakan apa saja yang telah dirumuskan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya sajikan data kuantitatif dan kualitatif yang terpilih menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan.

Data tersebut dapat melihat apakah program yang ada saat ini sudah memberikan dampak yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Langkah berikutnya untuk menganalisis sebuah kebijakan responsif gender atau tidak adalah dengan menganalisis berbagai sumber dan atau faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender, dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender dengan menggunakan empat elemen utama yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat.

Analisis gender adalah suatu alat untuk menyusun kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. PUG dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Dalam menerapkan strategi tersebut diperlukan suatu alat (tools) yang menjadi dasar dari setiap proses

pengarusutamaan gender baik dalam aspek kebijakan, program dan kegiatan yang akan dikembangkan/dilaksanakan. Alat tersebut adalah analisis gender yang variatif namun kesemuanya dimulai dengan penyediaan data dan fakta serta informasi tentang gender yaitu data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan serta dapat menggambarkan adanya kesenjangan gender misalnya dalam aspek akses, peran, control, dan manfaat.

Secara terinci analisis gender sangat penting manfaatnya, yaitu sebagai berikut.

1. Membuka wawasan dalam memahami suatu kesenjangan gender di daerah pada berbagai bidang, dengan menggunakan analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
2. Melalui analisis gender yang tepat, diharapkan dapat memberikan gambaran secara garis besar atau bahkan secara detil keadaan secara obyektif dan sesuai dengan kebenaran yang ada serta dapat dimengerti secara universal oleh berbagai pihak.

Dalam melakukan analisis gender, terdapat beberapa model teknik analisis gender yang pernah dikembangkan oleh para ahli antara lain Model Harvard, Model Moser, Model Proba, Model GAP, dan Model Longwe. Dalam penelitian ini, teknik analisis gender yang akan digunakan adalah Model Harvard yang dilanjutkan dengan Model Longwe.

Model Harvard (*Harvard Analisis Framework*). Overholt et al (1985) dalam Handayani T dkk (2002:170)

menyampaikan bahwa Analisis Model Harvard atau Kerangka Analisis Harvard, dikembangkan oleh *Harvard institute for International Development*, bekerja sama dengan Kantor *Women in Development (WID)*-USAID. Model Harvard ini didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender yang paling awal. Kerangka Harvard merupakan suatu analisis yang digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial dan peran gender dalam proyek pembangunan. Kerangka Analisis Harvard digunakan untuk menggali data (umum dan rinci) yang berguna pada tahap analisis situasi, mudah adaptasi untuk beragam situasi, merupakan alat bantu untuk meningkatkan kesadaran gender dan alat latihan yang efektif untuk menganalisis hubungan gender dalam masyarakat atau suatu organisasi pembangunan.

Kerangka Analisis Harvard digunakan untuk melihat bagaimana peran antara perempuan dan laki-laki dalam suatu proyek pembangunan. Apakah perempuan dapat mengakses dan mempunyai kontrol terhadap kegiatan pembangunan tersebut berkaitan dalam pengambilan keputusan, artinya perempuan dilibatkan dalam mengambil keputusan atau mengontrol penggunaan sumber daya.

Teknik analisis Harvard, yaitu suatu analisis yang digunakan untuk melihat suatu profil gender dari suatu kelompok sosial dalam pembangunan. Teknik analisis ini dapat melihat bagaimana kebijakan pada program pembangunan mempunyai dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Dikembangkan oleh *Harvard*

Institute for International Development bekerja sama dengan Kantor *Women in Development* (WID)-USAID. Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi WID yang merupakan kerangka analisis gender dan perencanaan gender paling awal.

Analisis gender ini, dapat dilakukan diberbagai tingkat, salah satunya adalah keluarga/rumah tangga. Pada tingkat ini, akan mempelajari pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam beragam peran, baik produktif, reproduktif dan sosial budaya/kemasyarakatan.

Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek, menyimpulkan data basis atau data dasar.

1. Tujuan Kerangka Harvard

Adapun Tujuan dari kerangka Harvard, yaitu:

- a. Untuk menunjukkan bahwa ada suatu investasi secara ekonomi yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki secara rasional.
- b. Untuk membantu para perencana merancang proyek yang lebih efisien dan memperbaiki produktivitas kerja secara menyeluruh.
- c. Mencari informasi yang lebih rinci sebagai dasar untuk mencapai tujuan efisiensi dengan tingkat keadilan gender yang optimal.
- d. Untuk memetakan pekerjaan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dan melihat faktor penyebab perbedaan.

2. Fokus Analisis Havard

Terdiri dari empat fokus analisis yaitu: akses, manfaat, partisipasi dan penguasaan (kontrol) yang berpotensi menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai obyek maupun sebagai subyek pembangunan (BAPPENAS, 2007).

- a. Akses, yaitu: Apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan telah mempertimbangkan untuk memberi akses yang adil bagi perempuan dan laki-laki (keadilan gender) dalam memanfaatkan/ memperoleh sumber-sumber daya pembangunan ?
- b. Manfaat, yaitu: apakah perencanaan pembangunan yang dikembangkan ditujukan untuk memberi manfaat bagi perempuan dan laki-laki ?
- c. Partisipasi, yaitu: apakah keikutsertaan/ suara masyarakat, terutama perempuan (dalam hal aspirasi, pengalaman, kebutuhan) dipertimbangkan/terakomodir dalam proses perencanaan pembangunan.?
- d. Kontrol, yaitu: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi tersebut.

3. Alat Analisis Harvard

Komponen/langkah dalam teknis analisis gender model Harvard meliputi analisis profil kegiatan 3 peran atau *triple roles* (terdiri atas peran publik dengan

kegiatan produktifnya, peran domestik dengan kegiatan reproduktifnya dan peran kemasyarakatan dengan kegiatan sosial budayanya), profil akses dan kontrol dan faktor yang mempengaruhi kegiatan akses dan kontrol. Sedangkan parameter yang digunakan adalah usia, alokasi waktu, jenis dan lokasi kegiatan serta pendapatan (Puspitawati, 2013).

- a. Profil Kegiatan, didasarkan pada konsep pembagian dengan data terpilah jenis kelamin. Profil kegiatan ini merinci kegiatan nyata menurut umur (siapa mengerjakan apa), penjadwalan (alokasi waktu) untuk kelompok-kelompok sosial ekonomi. Berguna untuk mengidentifikasi pekerjaan produktif dan reproduktif, sosial budaya dan kemasyarakatan dengan pertanyaan kunci: siapa melakukan apa?

Parameter lainnya juga perlu dilihat namun tergantung pada konteks, seperti:

- 1) Gender dan penggolongan usia: perempuan dewasa, laki-laki dewasa, anak perempuan, anak laki-laki, atau manula yang melakukan pekerjaan tersebut;
- 2) Alokasi waktu: berapa alokasi waktu yang dipakai untuk pekerjaan tertentu dan apakah dilakukan secara musiman atautkah harian.
- 3) Fokus pekerjaan: dimana pekerjaan itu dilakukan, tujuannya untuk mengetahui peta mobilitas penduduk.

- b. Akses dan Kontrol – Sumber dan Manfaat. Akses adalah peluang untuk memanfaatkan sumber-sumberdaya tetapi tidak mempunyai hak untuk mengontrolnya, sedangkan kontrol adalah kekuasaan untuk mengambil keputusan akan penggunaan sumberdaya serta keuntungannya. Akses dan kontrol, merinci sumber-sumber apa yang dikuasai laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang dari hasil kegiatan tersebut. Profil ini memperlihatkan siapa yang memiliki akses kepada sumberdaya dan kontrol atas penggunaannya, selanjutnya diidentifikasi, disusun dalam daftar apakah perempuan dan laki-laki mempunyai akses atau tidak kepada sumberdaya dan kontrol atas penggunaannya.
- c. Faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan, akses dan kontrol. Berpusat pada faktor-faktor dasar, yang menentukan pembagian kerja berdasarkan gender. Analisis disini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada butir a dan b. Karena pekerjaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan berubah dari waktu ke waktu sebagai akibat dari proses pembangunan atau perubahan lingkungan, maka pengertian tentang kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial budaya harus turut diperhitungkan dalam analisis.

Faktor-faktor yang memengaruhi ini mencakup semua yang membentuk relasi gender dan menentukan perbedaan kesempatan dan hambatan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu:

- 1) Norma-norma sosial dan strata sosial (misal: Pola/pola keluarga/komunitas, praktik budaya, keyakinan/agama, dst);
 - 2) Kondisi demografi;
 - 3) Struktur kelembagaan, termasuk struktur birokrasi pemerintah, kesepakatan sosial, dan penerusan pengetahuan, ketrampilan dan teknologi;
 - 4) Keadaan ekonomi secara umum, misalnya tingkat kemiskinan, tingkat inflasi, distribusi pendapatan, trend perdagangan internasional, dan infrastruktur.
 - 5) Kegiatan-kegiatan politik baik internal maupun eksternal,
 - 6) Parameter hukum.
 - 7) Pelatihan dan pendidikan, sikap masyarakat terhadap pekerja pembangunan.
4. Kekuatan Kerangka Analisis Gender Harvard
- a. Memberikan gambaran yang jelas tentang pembagian kerja berdasarkan gender khususnya menunjukkan pekerjaan perempuan terlihat, membuat perbedaan akses dan kontrol .

- b. Alat analisis yang praktis dan mudah untuk disesuaikan dengan kondisi terutama untuk proyek pada level mikro
 - c. Pintu masuk yang netral gender untuk mendiskusikan isu gender dengan kaum awam tidak terlalu menimbulkan defensifitas dari kelompok laki-laki.
5. Kelemahan Kerangka Analisis Gender Harvard
- a. Relasi gender diasumsikan bersifat statis/ tidak menunjukkan dinamika relasi (kolaborasi, persaingan, negosiasi, dst); tidak memperhitungkan relasi yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki sehingga proyek lebih menekankan kegiatan yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.
 - b. Tidak memperhitungkan perubahan waktu atau musim
 - c. Tidak sensitif terhadap perbedaan budaya atau konteks yang menentukan alokasi sumberdaya bagi penerima manfaat
 - d. Lebih berfokus pada efisiensi daripada kesetaraan
 - e. Tidak memperhitungkan sumberdaya yang terlihat secara kasatmata seperti sumberdaya manusia (*human capital*) seperti: keterampilan, pengetahuan, kapasitas untuk bekerja, kesehatan dan modal sosial (*social capital*) seperti jaringan sosial, hubungan kekerabatan, dan lain-lain.

BAB IX

EKOSISTEM MANGROVE

Menurut Asthon, *et al.*, (2003) bahwa tujuan pengelolaan ekosistem mangrove adalah untuk mendukung upaya-upaya konservasi, rehabilitasi dan penggunaan berkelanjutan ekosistem mangrove agar dapat memberikan keuntungan pada seluruh manusia di muka bumi ini, maka orientasi pengelolaan mangrove seharusnya adalah kelestarian dan bukannya kepentingan ekonomi jangka pendek yang pada akhirnya mengancam kelestarian hutan mangrove.

Pengelolaan mangrove secara lestari dapat terwujud, jika pemerintah, masyarakat dan pihak swasta, secara bersama-sama merencanakan pengelolaan mangrove yang berkelanjutan sesuai dengan kondisi fisik lingkungan dan sosial ekonomi. Selain itu, dibutuhkan komitmen yang kuat untuk melakukan apa yang telah direncanakan. Dua hal ini disebut oleh Suhendang dan Kusuma (1993), sebagai *collaborative management* dan *strong commitment*. Dengan mengembangkan kedua sikap tersebut, diharapkan permasalahan dapat diatasi dan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan dapat dilakukan.

Upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ekosistem mangrove tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, dalam

peraturan presiden tersebut dikatakan bahwa pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan adalah semua upaya perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari melalui proses terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya

Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM) ini, diharapkan pengelolaan ekosistem mangrove menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1), yaitu SNPEM bertujuan untuk mensinergikan kebijakan dan program pengelolaan ekosistem mangrove yang meliputi bidang ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin fungsi dan manfaat ekosistem mangrove secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Adapun pelaksanaan SNPEM mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah
3. Rencana Kehutanan Tingkat Nasional
4. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adanya Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tersebut, dapat memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan kerangka kerja dan prioritas pengelolaan ekosistem mangrove, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Terwujudnya rencana, penetapan dan koordinasi prioritas-prioritas pengelolaan hutan mangrove dalam rangka memanfaatkan secara efisien dan konsisten kapasitas hutan tersebut.
2. Terlindunginya wilayah-wilayah penting dari degradasi akibat pemanfaatan dan konsumsi yang berlebihan, dan pengrusakan habitat.
3. Berkembangnya sumberdaya di wilayah pesisir bagi pemanfaatan ekonomi melalui cara-cara keilmuan yang benar dan adil secara ekonomis.
4. Terwujudnya akuntabilitas dan kepemimpinan dalam pengelolaan hutan mangrove.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tersebut dimana pada Pasal 6 Ayat 1 (b) yang mengamanatkan kepada Pengarah, yakni Menteri Koordinator Perekonomian untuk menetapkan kebijakan yang lebih implementatif dan terarah, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No.4 Tahun 2017, tentang strategi Nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Dengan harapan bahwa pada tahun 2045, Indonesia kembali memiliki ekosistem mangrove terbesar dunia yaitu seluas 3,49 juta hektare (Lampiran Permenko, No.4 tahun 2017). Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove merupakan strategi tingkat nasional, yang akan memberikan pedoman dan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota), dan para pihak lainnya dalam pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan karakteristik daerah.

Regulasi Pengelolaan ekosistem mangrove, mempunyai 4 (empat) point besar, yaitu:

1. Melindungi mangrove sebagai kawasan konservasi, karena ekosistem mangrove mempunyai nilai penting ekologi
2. Pengembangan ekonomi, karena hutan mangrove memiliki nilai penting sosial ekonomi
3. Sinergisasi kebijakan antar sektor, karena ekosistem mangrove memiliki Nilai Penting kelembagaan
4. Ekosistem mangrove memiliki nilai penting perundang-undangan.

Bengen (2001) mengatakan, dalam kerangka pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove, terdapat dua konsep utama yang dapat diterapkan. Kedua konsep tersebut adalah perlindungan hutan mangrove dan rehabilitasi hutan mangrove. Kedua konsep tersebut, pada dasarnya memberikan legitimasi dan pengertian bahwa mangrove sangat memerlukan pengelolaan dan perlindungan agar dapat tetap lestari.

Beberapa ahli mendefinisikan istilah "mangrove" berbeda-beda, tetapi pada dasarnya merujuk pada pengertian yang sama. Tomlinsom dan Weightman (1986) dalam Saru (2014) mendefinisikan mangrove sebagai vegetasi yang terdapat di daerah pasang surut sebagai suatu komunitas. Hutan pasang surut atau hutan payau lebih dikenal dengan nama hutan mangrove merupakan vegetasi yang tumbuh dipengaruhi oleh kadar garam serta adanya aliran sungai yang berair tawar, sehingga pada

umumnya hutan mangrove berada di muara-muara sungai di tepi pantai yang cukup terlindung oleh hampasan dan gelombang air laut menurut Darsidi (1984) dalam Saru (2014). Definisi lain diberikan oleh Soerianegara (1987) dalam Saru (2014) bahwa hutan mangrove merupakan hutan yang tumbuh pada tanah berlumpur aluvial di daerah pantai dan muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut dengan beberapa genera atau spesies yaitu *Avicennia sp.*, *Sonneratia sp.*, *Rhizophora sp.*, *Bruguiera sp.*, *Ceriops sp.*, *Lumnitzera sp.*, *Excoecaria sp.*, *Xylocarpus sp.*, *Aegiceras sp.*, *Scyphyphora sp* dan *Nypa sp.*

Eksplorasi dan degradasi hutan mangrove mengakibatkan terjadinya perubahan ekosistem kawasan pantai, seperti intrusi air asin, abrasi pantai, punahnya berbagai jenis flora, fauna dan biota tertentu, menurutnya keanekaragaman hayati serta kerusakan habitat yang meluas sampai daratan. Sejalan dengan otonomi daerah, pengelolaan mangrove akan di pengaruhi oleh dinamika kelembagaan dan kebijakan daerah. Pemerintah daerah dan kepanjangan tangannya akan mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumberdaya alam termasuk mangrove (Saparinto, 2011).

Daerah-daerah pantai di Indonesia banyak didominasi oleh hutan mangrove yang tumbuh subur di kawasan intertidal beriklim tropis. Suburnya mangrove di Indonesia ditunjang oleh kondisi alami Indonesia yang memiliki iklim tropik disertai oleh curah hujan yang lebat serta sumber lumpur atau sedimen di pantai yang cocok untuk pertumbuhan mangrove (Sidik dkk, 2002). Ada

tiga parameter lingkungan utama yang menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan mangrove, yaitu suplai air tawar dan salinitas, pasokan nutrisi dan stabilitas substrat (Dahuri, 2003).

Mangrove dapat berkembang di kawasan yang tidak terdapat gelombang. Kondisi fisik pertama yang harus terdapat pada daerah mangrove ialah gerakan air yang minimal. Kurangnya gerakan air mempunyai pengaruh yang nyata. Gerakan air yang lambat dapat menyebabkan partikel sedimen yang halus cenderung mengendap dan berkumpul di dasar, hasilnya berupa kumpulan lumpur. Jadi substrat pada rawa mangrove biasanya berupa lumpur. Substrat inilah yang nantinya bermanfaat bagi penambahan luasan bagi suatu daerah (Supriharyono, 2000).

Kawasan pesisir dan laut merupakan sebuah ekosistem yang terpadu dan saling berkorelasi secara timbal balik. Masing-masing elemen dalam ekosistem memiliki peran dan fungsi yang saling mendukung. Kerusakan salah satu komponen ekosistem daratan dan lautan yang secara langsung berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem keseluruhan. Bagi wilayah pesisir, keberadaan hutan mangrove sebagai jalur hijau di sepanjang pantai dan muara sungai sangatlah penting. Hutan mangrove berfungsi sebagai sumber kayu bakar, tempat hidup dan berpijah ikan dan udang serta mempertahankan lahan budidaya perairan, pertanian dan perumahan penduduk yang berada dibelakangnya dari gangguan abrasi, intrusi dan angin laut yang kencang (Onrizal, 2002).

Para ahli berpendapat bahwa hutan mangrove memiliki fungsi fisik, fungsi biologi dan fungsi ekonomi. Fungsi fisik dan biologi sering dikatakan sebagai fungsi ekologis dan selalu mengalami perubahan akibat aktifitas manusia, sedangkan fungsi ekonomi merupakan fungsi tambahan dalam unsur ekologis yang melibatkan berbagai aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, baik manfaat langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Arief (1994) dan LPP Mangrove Indonesia (2008), fungsi hutan mangrove dapat dipandang dari beberapa aspek biologi, aspek fisika dan aspek ekonomi. Ditinjau dari aspek biologi, hutan mangrove memiliki fungsi sebagai (1) tempat pemijahan (spawning ground) dan pertumbuhan pasca larva (nursery ground) komoditi perikanan bernilai ekonomis tinggi (ikan, kepiting, udang dan kerang), (2) perlindungan berbagai jenis satwa liar seperti monyet, biawak, buaya, dan burung dan (3) penyerapan karbon dan penghasil oksigen yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup, (4) tempat terdapatnya sumber makanan dan unsurunsur hara. Daun mangrove berfungsi sebagai sumber bahan organik dan sumber pakan konsumen pertama yaitu pakan cacing, kepiting dan golongan kerang dan keong yang selanjutnya menjadi sumber makanan bagi konsumen di atasnya sesuai siklus rantai makanan dalam suatu ekosistem.

Ditinjau dari aspek fisika hutan mangrove memiliki fungsi sebagai (1) pembangunan lahan dan pengendapan lumpur sehingga dapat memperluas daratan, (2) menjaga garis pantai agar tetap stabil, perlindungan pantai dari

abrasi 10 akibat gelombang ombak, arus, banjir akibat laut pasang dan terpaan angin, (3) pencegahan intrusi air laut ke daratan, dan (4) pengelolah limbah organik dan perangkap zat-zat pencemar (pollutant trap) baik di udara maupun di rawa dan pantai seperti CO₂.

Ditinjau dari aspek ekonomi hutan mangrove memiliki fungsi sebagai (1) bahan bakar berupa kayu bakar dan arang, (2) bahan bangunan berupa kayu bangunan, tiang dan pagar, (3) alat penangkap ikan berupa tiang sero, bubu, pelampung dan bagan, (4) makanan, minuman, alkohol dan obat-obatan, (5) bahan baku pulp dan kertas, (6) bahan baku untuk membuat alat-alat rumah tangga dan kerajinan, (7) pariwisata. Vegetasi mangrove yang dijadikan sebagai bahan obat-obatan berupa daun *Bruguiera sexangula* (Lour) untuk obat penghambat tumor, *Ceriops tagal* (Pers) dan *Xylocarpus mollucensis* (Lamk) untuk obat sakit gigi. Daun nipa dapat digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan atap rumah; tannin yang dihasilkan mangrove berfungsi sebagai bahan baku pembuatan tinta, plastik, lem dan pengawet.

Mangrove dapat tumbuh dan berkembang secara maksimum dalam kondisi penggenangan dan sirkulasi air permukaan yang menyebabkan pertukaran dan pergantian sedimen secara terus menerus. Sirkulasi yang terus menerus dapat meningkatkan pasokan oksigen dan nutrisi, untuk keperluan respirasi dan fotosintesis. Sirkulasi perairan khususnya perubahan konsentrasi salinitas dapat menghilangkan garam-garam dan bahan-bahan alkalin, oleh karena kandungan garam-garam air dapat

menetralsir kemasaman tanah. Oleh karena itu, mangrove dapat tumbuh pada berbagai macam substrat yang bergantung pada proses pertukaran air untuk memelihara pertumbuhan (Dahuri, 2003).

Ekosistem Mangrove adalah ekosistem yang terdapat di daerah pantai yang selalu atau secara teratur tergenang air laut dan terpengaruh oleh pasang surut air laut. Sedangkan daerah pantai adalah daratan yang terletak di bagian hilir daerah aliran sungai (DAS) yang berbatasan dengan laut dan masih dipengaruhi oleh pasang surut (Departemen Kehutanan, 1994 dalam Santoso, 2000).

Klein (1962) dalam Widiastuti (2001), Ekosistem Mangrove sebagai ekosistem peralihan antara darat dan laut telah diketahui mempunyai berbagai fungsi, yaitu sebagai penghasil bahan organik, tempat berlindung berbagai jenis binatang, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang, sebagai pelindung pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, penghasil kayu bangunan, kayu bakar, kayu arang, dan tannin.

Moss (1997) dalam Ardi (2000), Ekosistem Mangrove dikategorikan sebagai ekosistem yang tinggi produktivitasnya yang memberikan kontribusi terhadap produktivitas ekosistem pesisir. Dalam hal ini beberapa fungsi Ekosistem Mangrove adalah sebagai berikut :

1. Ekosistem Mangrove sebagai penghalang terhadap erosi pantai, tiupan angin kencang dan gempuran ombak yang kuat serta pencegahan intrusi air laut

2. Ekosistem Mangrove dapat membantu kesuburan tanah, sehingga segala macam biota perairan dapat tumbuh dengan subur sebagai makanan alami ikan dan binatang laut lainnya
3. Ekosistem Mangrove dapat membantu perluasan daratan ke laut dan pengolahan limbah organik
4. Ekosistem Mangrove dapat dimanfaatkan bagi tujuan budidaya ikan, udang dan kepiting mangrove dalam keramba dan budidaya tiram karena adanya aliran sungai atau perairan yang melalui Ekosistem Mangrove
5. Ekosistem Mangrove sebagai penghasil kayu dan non kayu
6. Ekosistem Mangrove berpotensi untuk fungsi pendidikan dan rekreasi
7. Ekosistem Mangrove sebagai tempat asuhan (nursery ground), tempat mencari makan (feeding ground), tempat berkembang biak berbagai jenis crustasea, ikan, burung biawak, ular, serta sebagai tempat tumpangan tumbuhan epifit dan parasit seperti anggrek, paku pakis dan tumbuhan semut, dan berbagai kehidupan lainnya.

BAB X

KEBIJAKAN PUBLIK: GENDER, WILAYAH PESISIR DAN PELESTARIAN MANGROVE

A. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Sejak 22 tahun yang lalu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*), melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984, sebab pemerintah menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Diskriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia (KPPPA, 2006).

Selanjutnya, pada tahun 2000 Presiden RI, Abdurrahman Wahid, mengeluarkan instruksi Presiden No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan (Inpres PUG), dengan harapan pembangunan nasional akan mengintegrasikan perspektif gender sejak proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, sampai kepada evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. Untuk memperkuat payung hukum Pengarusutamaan Gender, maka tahun 2006, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyusun draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengarusutamaan Gender. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menandatangani dokumen kesepakatan

global tentang *Sustainable Development Goals* (SDG) atau istilah resmi pemerintah adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang terdiri dari 17 tujuan (*goal*) dan 169 sasaran (*target*), dalam TPB tersebut terdapat satu tujuan, yaitu: mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. *Sustainable Development Goal* (SDG) mempunyai 5 target untuk mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, yaitu :

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan
3. Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan
4. Menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan
5. Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi

Visi dari ke 5 (lima) tujuan pembangunan berkelanjutan ini sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang sedang berjalan di Indonesia (KPPPA, 2006).

Sasaran strategi pengarusutamaan gender (PUG) adalah upaya untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh kebijakan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Gender bukanlah kodrat dari ketentuan Tuhan, tetapi berkaitan

dengan keyakinan bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada (KPP, 2002a). Saat ini, yang menjadi landasan pokok untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.2 tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (RI, 2000). Dengan demikian, melalui strategi PUG dapat dikembangkan kebijakan dan program yang responsif gender. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut PUG di daerah, maka pada tahun 2008 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan regulasi, yaitu Permendagri No. 15 tahun 2008 tentang pelaksanaan PUG di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Permendagri ini merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di daerah. Dalam konsideran menimbang, juga ditegaskan mengenai landasan tentang urgensi penetapan Permendagri No.15 Tahun 2008, tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan

gender di daerah. Secara lengkap dinyatakan bahwa "dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah" (Depdagri, 2008).

Penguatan dari pemerintah tersebut, dapat dikatakan memberi warna terang tentang keharusan pada *stakeholder* untuk tidak mengesampingkan posisi perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan, dan tugas utama penggiat peningkatan kesetaraan perempuan adalah mempelajari lalu memperbaiki cara berpikir perempuan itu sendiri agar mau berubah. Hal ini berkaitan dengan sosiolog feminis yang menyatakan bahwa perempuan merasakan diri mereka demikian dibatasi oleh status mereka sebagai perempuan sehingga gagasan yang mereka bangun untuk kehidupan mereka hampir menjadi teori tanpa makna. Perempuan berpengalaman merencanakan dan bertindak dalam rangka mengurus berbagai kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan kepentingan orang lain, bertindak atas dasar kerjasama, bukan karena keunggulan sendiri, dan mungkin mengevaluasi pengalaman dari peran penyeimbang mereka bukan sebagai peran yang penuh konflik, tetapi sebagai respon yang lebih tepat terhadap kehidupan sosial daripada kompartementalisasi peran (Ritzer dan Goodman, 2004).

Riniwati *et al.*, (2017) juga mengatakan bahwa peran perempuan masih termarginalkan dalam pembangunan, hal ini diungkapkan dari hasil penelitian yang dilakukan di pelabuhan perikanan pantai Mayangan Probolinggo, walaupun perempuan dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan pelabuhan, namun hanya di pinggiran bukan hal yang dapat memenuhi kebutuhan strategis gender.

Penyebab perempuan terisolir dari proses pembangunan adalah: (1) beban ganda dimana perempuan melakukan pekerjaan domestik dan sekaligus mencari nafkah; dan (2) kebijakan pembangunan tidak diperuntukan bagi kaum perempuan. Kaum lelaki dianggap sebagai kepala rumahtangga dan berhak untuk jadi wakil dalam komunitas yang lebih luas (Krisnawaty, 1993). Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pembangunan berprespektif gender yang merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan PUG kedalam kegiatan nyata institusi sektor. Intinya adalah mengintegrasikan permasalahan diskriminasi terhadap lelaki dan perempuan kedalam seluruh komponen perencanaan pembangunan yaitu kebijakan, program dan kegiatan, sehingga kepentingan, aspirasi dan kebutuhan peningkatan peran dan partisipasi perempuan dan lelaki dalam pembangunan dapat diakomodasikan secara proporsional kedalam kepentingan dan tujuan pembangunan pada institusi sektor (KPP, 2002).

B. Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dan Berkelanjutan

Pengelolaan Wilayah pesisir secara terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang dinamis dan terus menerus, dimana segala keputusan dibuat untuk penggunaan yang berkelanjutan, pembangunan dan perlindungan terhadap daerah serta sumberdaya pesisir dan laut (Dahuri *et al.*, 2004). Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, sumberdaya wilayah pesisir memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan, yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan berperan penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, khususnya mangrove. Meskipun tidak selalu harus menggunakan mekanisme kebijakan untuk memecahkan semua permasalahan kerusakan atau konflik dalam penggunaan sumberdaya, namun hukum dan peraturan yang berlaku merupakan bagian penting dari suatu proses.

Menurut Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyebutkan bahwa "Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat." (RI, 2007).

Tujuan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RI, 2007) adalah :

1. Melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan; dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pembangunan secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan. Oleh karena itu pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk tujuan nasional akan dapat berhasil jika dikelola secara terpadu. Menurut Dahuri, *et al.*, (2004) pemanfaatan sumberdaya pesisir secara sektoral tidaklah efektif.

Cincin-Sain dan Knecht (1998) menyatakan bahwa pengelolaan terpadu adalah suatu proses dinamis dan kontinyu dalam membuat keputusan untuk pemanfaatan, pembangunan dan perlindungan kawasan pesisir lautan beserta sumberdaya alamnya secara berkelanjutan dan dalam proses pengelolannya, memiliki empat tahap utama, yaitu: (1) penataan dan perencanaan, (2) formulasi, (3) implementasi, dan (4) evaluasi. Sedangkan secara teknis didefinisikan sebagai suatu upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam kawasan pesisir dan lautan untuk kesejahteraan manusia sedemikian rupa, sehingga laju (tingkat) pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melebihi daya dukung (*carrying capacity*) kawasan pesisir dan lautan untuk menyediakannya. Tulungen, *et al.*, (2003), mengartikan pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu sebagai suatu proses dinamis dan berkelanjutan yang menyatukan pemerintah dan masyarakat, ilmu pengetahuan dan pengelolaan, serta kepentingan sektoral dan masyarakat umum dalam menyiapkan dan melaksanakan suatu rencana terpadu untuk perlindungan dan pengembangan sumberdaya dan ekosistem pesisir.

Konteks keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi yakni dimensi sektoral, dimensi bidang ilmu dan dimensi keterkaitan ekologis (Dahuri, *et al.*, 2004).

1. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintah tertentu (*horizontal integration*) dan

antar tingkat pemerintahan dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai tingkat pusat (*vertical integration*)

2. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu
3. Wilayah pesisir tersusun dari berbagai macam ekosistem yang satu sama lainnya saling terkait, tidak berdiri sendiri. Perubahan dan kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Selain itu, wilayah pesisir juga di pengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia di daerah daratan (*upland areas*) maupun lautan lepas (*oceans*).

Pembangunan berkelanjutan adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial dimana masyarakat bergantung kepadanya. Suatu kegiatan dikatakan berkelanjutan, apabila kegiatan pembangunan secara ekonomis, ekologis dan sosial politik bersifat berkelanjutan. Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan capital (*capital maintenance*), dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien. Berkelanjutan secara ekologis, mengandung arti, bahwa kegiatan dimaksud harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati (*biodiversity*), sehingga

diharapkan pemanfaatan sumberdaya dapat berkelanjutan. Berkelanjutan secara sosial politik mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (dekratisasi), identitas sosial, partisipasi sosial, dan pengembangan kelembagaan (Wiyana, 2004).

Keberhasilan penerapannya memerlukan kebijakan, perencanaan dan proses pembelajaran sosial yang terpadu, viabilitas politiknya tergantung pada dukungan penuh masyarakat melalui pemerintahan, kelembagaan sosial dan kegiatan dunia usahanya (Soemarwoto, 2006). Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batas yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktifitas manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumber alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungan.

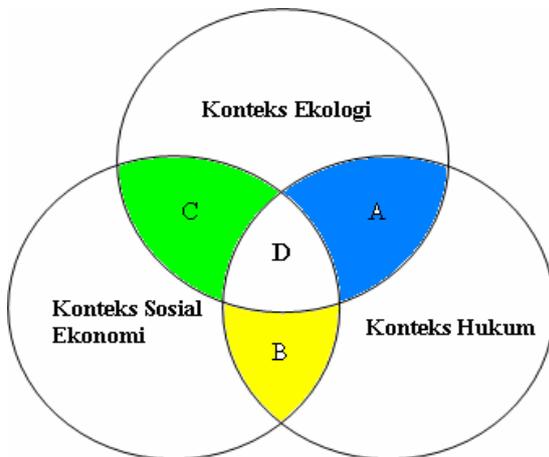
Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa merusak atau menurunkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (WCED, 1987) dalam Dahuri, *et al.*, (2004). Selanjutnya Bengen (2004) berpendapat bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan visi dunia internasional sudah saatnya juga merupakan visi nasional. Visi pembangunan berkelanjutan tidak melarang aktivitas pembangunan ekonomi, tetapi

menganjurkannya dengan persyaratan bahwa laju (tingkat) kegiatan pembangunan tidak melampaui daya dukung (*carrying capacity*) lingkungan alam. Dengan demikian, generasi mendatang tetap memiliki aset sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*environmental service*) yang sama atau kalau dapat lebih baik dari pada generasi yang hidup sekarang.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan merupakan suatu strategi pembangunan yang memberikan semacam ambang batas (*limit*) pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah serta sumberdaya alam yang ada didalamnya. Ambang batas yang dimaksud tidaklah bersifat mutlak (*absolute*), melainkan merupakan batasan yang luwes (*flexible*) yang bergantung pada kondisi teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer untuk menerima dampak kegiatan manusia. Secara garis besar konsep pembangunan berkelanjutan memiliki empat dimensi: (1) dimensi ekologis, (2) dimensi sosial ekonomi budaya, (3) dimensi sosial politik, dan (4) hukum dan kelembagaan. (Dahuri, *et al.*, 2004). Sedangkan Kangkan, *et al.*, (2017), yang melakukan penelitian di Nusa Tenggara Timur menambahkan satu dimensi lagi yaitu dimensi tata ruang, sehingga ada lima dimensi untuk konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, ekologi, sosial, penataan ruang dan kelembagaan, hal ini didasari oleh pemikiran bahwa keberlanjutan sumberdaya pesisir Teluk Kupang, dapat diupayakan dengan model kolaborasi yang

memperhatikan faktor-faktor ekologi, ekonomi, sosial, penataan ruang dan kelembagaan.

Konsep pengelolaan lain yang berbasis Sosial-Ekosistem yang juga telah diperkenalkan oleh Meffe, *et al.*, (2002), menggambarkan bahwa pada dasarnya pendekatan ini mengintegrasikan antara pemahaman ekologi dan nilai-nilai sosial ekonomi. Dalam hal ini tujuan pengelolaan berbasis ekosistem adalah memelihara, menjaga kelestarian dan integritas ekosistem sehingga pada saat yang sama mampu menjamin keberlanjutan suplai sumberdaya untuk kepentingan sosial ekonomi manusia. Regim kolaboratif untuk mencapai tujuan tersebut adalah tiga pilar pengelolaan berbasis ekologi, sosial ekonomi dan institusi (Gambar 2.2). Dari gambar tersebut, terdapat 4 konteks kebijakan yang masing-masing merupakan irisan dari dua perspektif tersebut.



Gambar 2.2. Tiga Pilar Pengelolaan Berbasis Sosial-Ekosistem (Meffe, *et al.*, 2002)

Gambar 2.2. di atas dapat dijelaskan bahwa daerah A adalah zona otoritas pengelolaan (*zone of management authority*) dimana institusi pengelola mendapatkan mandat dari masyarakat untuk melakukan regulasi terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan ekosistem. Daerah B disebut sebagai daerah kewajiban masyarakat (*zone of societal obligations*) dimana kebijakan yang diambil institusi menitikberatkan pada kepentingan masyarakat. Sementara itu daerah C adalah daerah pengaruh (*zone of influence*) di mana dinamika keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial ekonomi terjadi dalam konteks proses dan bukan pada regulasi atau otoritas. Dengan kata lain proses saling mempengaruhi antar keduanya menjadi fokus utama dari perspektif daerah C. Terakhir daerah D sering pula disebut sebagai daerah interaksi bersama (*zone of win-win-win partnership*) di mana fokus utama pembangunan berbasis pada sistem sosial-ekologi berada. Dalam konteks ini, pandangan ketiga pilar pengelolaan berbasis sosial-ekosistem menjadi sama penting dan diwujudkan dalam kebijakan pembangunan yang komprehensif dan terpadu.

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya menjaga kelestarian alam pesisir dan laut demi keberlangsungan mata pencaharian dan keamanan terhadap bencana alam. Disinilah peran Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir untuk dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta dan kemampuan masyarakat agar mampu menjaga dan mengelola lingkungan pesisir dan laut secara bijaksana

sehingga manfaatnya dapat dinikmati secara optimal dan berkelanjutan.

Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain adalah mengidentifikasi potensi-potensi sumberdaya alam laut dan pesisir yang ada di Kalimantan Tengah; melatih masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam, termasuk didalamnya mengolah sumberdaya alam tersebut agar memiliki nilai tambah sehingga manfaat ekonominya lebih tinggi, dan mencari akses pasar untuk produk-produk yang dihasilkan; melatih masyarakat untuk dapat melakukan rehabilitasi terhadap sumberdaya alam yang rusak; serta meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana alam di wilayah laut dan pesisir.

lam melaksanakan hal-hal tersebut diatas perlu dibangun semangat kegotongroyongan pada masyarakat agar setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih cepat tercapai dan lebih besar manfaatnya bagi komunitas dan masyarakat disekitarnya. Untuk itulah dalam setiap pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk kelompok yang mau berkomitmen untuk dibina. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir dan laut, juga perlu memperhatikan keterlibatan dan peran serta kaum wanita, sehingga dapat terwujud kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2003. Pembangunan berkelanjutan ,Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.
- Anonim, 1997. *Photovoltaics: Basic Design Principles and Components*, 1997 : 3. This document was produced for the U.S. Department of Energy (DOE) by the National Renewable Energy Laboratory (NREL).
- Anonim, 2008. *Planning & Installing Photovoltaic System. A guide for Installer Architects and Engineers* . Second edition, German 2008.
- Anonim, 2010. *Green Building Council Indonesia. GreenShip Rating Tool 1.0*. untuk Bangunan Baru, Jakarta, Green Building Council Indonesia – World Green Building Council.
- Anonim, Ruang Terbuka Hijau Sebagai Acuan Perencanaan Tata Ruang, biro pembangunan. acehprov.go.id hal 2.
- Anonim, 2011. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Pekerjaan Umum.
- Ashrae 2009 Handbook – Fundamental, 14.8.
- Astuti dan A. Fajar. Mengenal Meteorologi, BMKG, D.I. Yogyakarta.
- Aziz, A, 2009. Pengaruh Material Penutup Atap terhadap Nilai RTTV, Tesis S2 Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Ayuni, M, 2012. Kerangka Kebijakan dan Instrumen Regulasi Konservasi dan Efisiensi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Workshop: Membuka Potensi Investasi untuk Efisiensi Energi di Indonesia" Jakarta, 31 Januari 2012. Hal 1 - 25.
- Budihardjo, E, 1997. *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Budihardjo, E, 1998. *Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City)*, UI Press, Jakarta.
- Bonifacius, N. 2012. Optimalisasi Kondisi Termal Dan Pembangkitan Energi Pada Atap Photovoltaic Terintegrasi di Daerah Tropis Lembab. Program Doktor Program Pascasarjana Program Studi/Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institute Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya .
- Chapin, D, Fuller M. C. S and Pearson G. L, 1954. *A New Silicon p-n junction photocell for converting solar radiation into electrical power*, *J. Appl. Phys.* 25 (1954) 676.
- Ching, F. D. K. 1985. Terjemahan Ir. Paulus Hanoto Adjie. *Arsitektur : Bentuk – Ruang & Susunannya*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Daldjoeni, N, 1983. *Pokok-Pokok Klimatologi*. Penerbit Alumni 1986 Bandung.
- Echols, J dan Shadily, 1982. *Kamus Inggris Indonesia, An English-Indonesian Dictionary*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Effendy, N. Ashfahani, Yulinggar, dan Wardana, 2008. *Aplikasi Kontrol Logika Fuzzy pada Sistem Tracking Matahari (Sun Tracking System) Panel Photovoltaic*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2008

- (SNATI 2008) ISSN: 1907-5022 Yogyakarta, 21 Juni 2008. G 27- G 31.
- Flavin, C dan Lenssen N, 1995. Gelombang Revolusi Energi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Hakim, R dan Utomo, 2003. Komponen Perancangan Arsitektur landscape. Jakarta. Hal. 50.
- Kayo, T. 2003. *New Estimates Of The Demand For Urban Green Space: Implications For Valuing The Environmental Benefits Of Boston's Big Dig Project*, Tufts University Journal of Urban Affairs, Volume 25, Number 5, pages 641–655. Copyright # 2003 Urban Affairs Association All rights of reproduction in any form reserved. ISSN: 0735-2166. Hal. 641-655
- Kanevce, A, 2007. *Anticipated Performance Of Cu(In,Ga)Se₂ Solar Cells In The Thin-Film Limit*. For the Degree of Doctor of Philosophy Colorado State University Fort Collins, Colorado Fall 2007.
- Kazmerski and Lawrence L, 2006. *Solar photovoltaics R&D at the tipping point: A 2005 technology overview*, Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 150 (2006) 105–135.
- Kusdiana, D. 2008. Kondisi Riil Kebutuhan Energi di Indonesia dan Sumber-Sumber Energi Alternatif Terbarukan . Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi , Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bogor, 3 Desember 2008.
- Kristianto, A. N, 2010. Studi Kelayakan Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Di Pulau Biaro Dengan Menggunakan Metode Real Option, Tesis Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Lakitan, B. 1994. Dasar-dasar Klimatologi, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

- Lang, K. R. 2003, *The Cambridge Guid to The Solar System*, Cambridge: Cambridge University Press, Inggris. Hal. 183.
- Lohonauman, Y, 2012. *Military Arcade Games* di Manado. Laporan Tugas Akhir Program Studi S1 Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Littlefair, P, 1998. *Passive Solar Urban Design Ensuring the Penetration of Solar Energy into the City, Renewable and Sustainable Energy Reviews* 2.303-326 Building Research Establishment\ Garston\ Watford\ WD1 6JR\ U[K] hal 303 – 319
- Lechner, N, 2007. *Heating, Cooling, Lighting*. Metode Desain untuk Arsitektur Edisi Kedua. Hal 198 – 232.
- Mangunwijaya, YB, 1988. Pengantar Fisika Bangunan. Djambatan Yogyakarta. Cetakan ketiga.
- Mintorogo, D. S, 2000, Strategi Aplikasi Sel Surya (*Photovoltaic Cell*) pada Perumahan dan Bangunan Komersial, Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur, Vol 28 No 2 Desember 2000. Hal. 129 – 141.
- Moniaga, I. L, 2008. Studi Ruang Terbuka Hijau Kota Manado dengan Pendekatan Sistem Dinamik. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Hal. 3 – 99.
- Muchammad dan Yohana E, 2010. Pengaruh Suhu Permukaan *Photovoltaic Module 50 Watt Peak* terhadap Daya Keluaran yang dihasilkan menggunakan Reflektor dengan Variasi Sudut Reflektor 0°, 50°, 60°, 70°, 80°, Jurnal Teknik Mesin Rotasi – Vol. 12, No. 4, Juli 2010: 14–18 15. Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Diponegoro *E-mail: m_mad5373@yahoo.com. Hal. 2.

- Naville and Richard C, 1995. *Solar Energy Conversion*. Elsevier. USA
- Nugroho, B. A, 1997. Makalah Musyawarah Nasional IV Perkumpulan Pencinta Tanaman Bandung – Bali 5 – 8 Nopember 1997 PPT dan Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. Hal. 46 – 49.
- Nurzal, dan Suminto, 2010. Penerapan Standar Manajemen Energi untuk Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia. *Jurnal Standardisasi* Vol 12, No 3 tahun 2010. Hal. 174–185.
- Priatman, J, 2002. " *Energy-Efficient Architecture*" Paradigma dan Manifestasi Arsitektur Hijau, *Dimensi Teknik Arsitektur* Vol.30 No 2 Desember 2002 Hal. 167-175.
- Rafii, S, 1995. *Meteorologi dan Klimatologi*, Angkasa. Bandung.
- Rahadjo, A, Herlina dan Safruddin H, 2008. Optimalisasi Pemanfaatan Sel Surya Pada Bangunan Komersial Secara Terintegrasi sebagai Bangunan Hemat Energi. Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia. *Email : amien@eng.ui.ac.id*. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Teknologi-II 2008 Universitas Lampung, 17-18 November 2008.
- Rahmiati, M, 2009. *The Study of the Comfortness Aspect at Pedestrian Space on MH.Thamrin-Jend.Sudirman Street Jakarta.Proceeding the International Symposium of Green City " The Future Challenge"* August 10-11, 2009 IPB International Convention Center-Bogor Indonesia. Hal. 314 – 321.
- Roberts, S dan Guariento N, 2009. *Building Integrated Photovoltaics A Handbook*. Berlin.
- Romasindah, K. 2008. Optimasi Kinerja Panel Surya dengan Pengaturan Panel sebagai Sun Shading untuk Menekan

- Biaya Listrik Bangunan. Tesis Pasca Sarjana Teknik Arsitektur Universitas Indonesia.
- Suryatna, R, 1995. Meteorologi dan Klimatologi, Angkasa. Bandung.
- Sangkertadi, 2002, Studi Potensi Bentuk Atap Rumah Tradisional Minahasa untuk Kajian Efektifitas Penempatan Sel-Surya. Jurnal Ekoton ISSN: 1412-3487 Vol.2 No.2. Oktober 2002 Penerbit PSL.LP Unsrat-Manado.
- Sangkertadi, 2004. Kajian Peluang Konservasi Energi Bangunan Pada Arsitektur Tradisional. Studi kasus rumah tradisional Minahasa, Jurnal Teknik, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, ISSN 0854-2139, Vol.X, No.1. April 2004.
- Sangkertadi, 2006. Fisika Bangunan untuk Mahasiswa dan Praktisi Teknik dan Arsitektur, Wirausaha Muda, Bogor.
- Sangkertadi 2009. Petunjuk Pemakaian Program Matahari, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Unversitas Sam Ratulangi, Manado.
- Sangkertadi dan Syafriny, 2009. *Influence of Surtace Material and Tress Dencity on Thermal Environmental and Comford for Pedestrian in Tropical and Humid Climate, Proceeding The International Symposium of Green City "The Future Challenge"* August 10-11, 2009 IPB International Convention Center-Bogor Indonesia. Hal. 327 - 341
- Sangkertadi, 2010. Perlu Kontribusi Tata Ruang terhadap Urban Environmental Accords 2005. Menuju Green City 2012, Makalah dalam Bimbingan Teknis Pelaksanaan Penataan Ruang Sulawesi Utara, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Sulawesi Utara, Manado, 22 September 2010.

- Samsudi, 2010. Ruang Terbuka Hijau Kebutuhan Tata Ruang Perkotaan Kota Surakarta Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, *Jurnal of Rural and Development* Vol. 1 no 1 tahun Februari 2010.
- Satwiko, P, 2009. Fisika Bangunan, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Sarhaddi, 2010 .*Energetic Performance Evaluation of a Solar Photovoltaic (PV) Array, Australian Journal of Basic and Applied Sciences*, 4(3): 502-519 ISSN 1991-8178 © 2010, INSIInet Publication.
- Setiono, Yustian, Leonardus dan Pratomo, 2000. Memaksimalkan Daya *Photovoltaic* sebagai *Charger Controller*. Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 50234, Indonesia. E-mail: felix_yustian@yahoo.com .
- Sidharta, 1996. Pendidikan Arsitektur dan Masa Depan Arsitektur Indonesia. Arsitektur Bicara Tentang Arsitektur Indonesia. Editor Prof.Ir.Eko Budihardjo, M.Sc. Penerbit Alumni 1996 Bandung.
- Soemarno, 2010. Ruang Terbuka Hijau dan Lingkungan Perkotaan, PM-PSLP PPSUB Malang. Hal 11.
- Soetrisno, M. R, 2010. Efektivitas Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Perumnas Toddopuli Panakkukang Permai Kota Makassar. Tesis Program Studi Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang. Hal 24-25.
- Sofian, A dan Salim, 2012. Kemandirian energi dan Kesejahteraan Rakyat. Peneliti di BPPT Kimia-LIPI & di P2 Ekonomi - LIPIKementrian Riset dan Teknologi, 2012 <http://www.ristek.go.id>(*Jurnal Nasional*, 29 Maret 2012/ *humasristek*. Hal. 1 – 3.

- Sorensen and Harry A, 1983. *Energi Conversion System*, John Willey and Sons, Canada
- Sudarisman dan Irwan, 2008. Perancangan Ruang Publik Dengan Dasar Pendekatan Perilaku (Studi Kasus: Kawasan Stasiun Kereta Api Bandung Bagian Selatan) Central Library Institute Technology Bandung Master Theses From JBPTITBPP / 2008-05-23.
- Sugiyono, A dan M.S. Boedoyo, 1999. Perubahan Pola Penggunaan Energi dan Perencanaan Energi. Hasil-Hasil Lokakarya Energi Nasional ke-17 1999. Komite Nasional Indonesia *World Energy Council*. Jakarta, 10 – 11 Maret 1999.
- Sukawi, 2011. Penerapan Konsep Sadar Energi dalam Perancangan Arsitektur yang Berkelanjutan, Prosiding Seminar Nasional AvoER ke-3 tanggal 26-27 Oktober, Palembang. Hal. 136-143.
- Suwanda, 2011. Desain Eksperimen untuk Penelitian Ilmiah, Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sullivan, P.O, 1994. *Global Warming and the Built Environment*, edited by Robert Samuels dan Deo K. Prasad. E & FN Spon, London.
- Tauhid, 2008. Kajian Jarak Jangkauan Efek Vegetasi Pohon terhadap Suhu Udara Pada Siang Hari di Perkotaan (Studi Kasus: Kawasan Simpang Lima Kota Semarang) Program Studi Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 84.
- Vreeker, R and Nijkamp, 2011. *A Multi-Criteria Evaluation Of Green Spaces In European Cities Tüzin Baycan-Levent Istanbul Technical Sage Publications Los Angeles*, London, New Delhi and Singapore 16(2): 193–

21310.1177/0969776408101683 Copyright © 2009.
<http://eur.sagepub.com>

- Widigo, C. Wanda dan I. K. Canadharma, 2008. Pendekatan Ekologi pada Rancangan Arsitektur sebagai upaya mengurangi Pemanasan Global. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, UK Petra wandaw@peter.petra.ac.id, Fakultas Desain dan Teknik Perencanaan, Universitas Pelita Harapan.
- Wibowo, R, 2009. Studi Penggunaan Solar Reflector Untuk Optimalisasi Output Daya Pada Photovoltaic Modul. Skripsi Universitas Kristen Petra. Surabaya.
- Windy, A, 2007. Pengaruh Sudut Panel Solar Cell Merk Solarex MSX 53 Terhadap Daya yang dihasilkan. Skripsi S1 Teknik Mesin di Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Wisaksono, W, B. Sanusi, A. Nugrahanti, R. G. O. B. Situmorang, S. Abduh, I. G. O. S. Pribadi, E. Sediadi R, T. G. Amran dan A. Prayitno, 2004. Bunga Rampai Energi, Pusat Kajian Energi dan Sumber Daya Mineral Universitas Trisakti. Hal 68.
- Zahnd, M, 2008. Model Baru Perancangan Kota yang Kontekstual Kajian tentang Kawasan Tradisional di Kota Semarang dan Yogyakarta Suatu potensi perancangan kota yang efektif, Seri Strategi Arsitektur 3, Penerbit Kanisius – Soegijapranata University Press Semarang. Hal. 66, 71.